

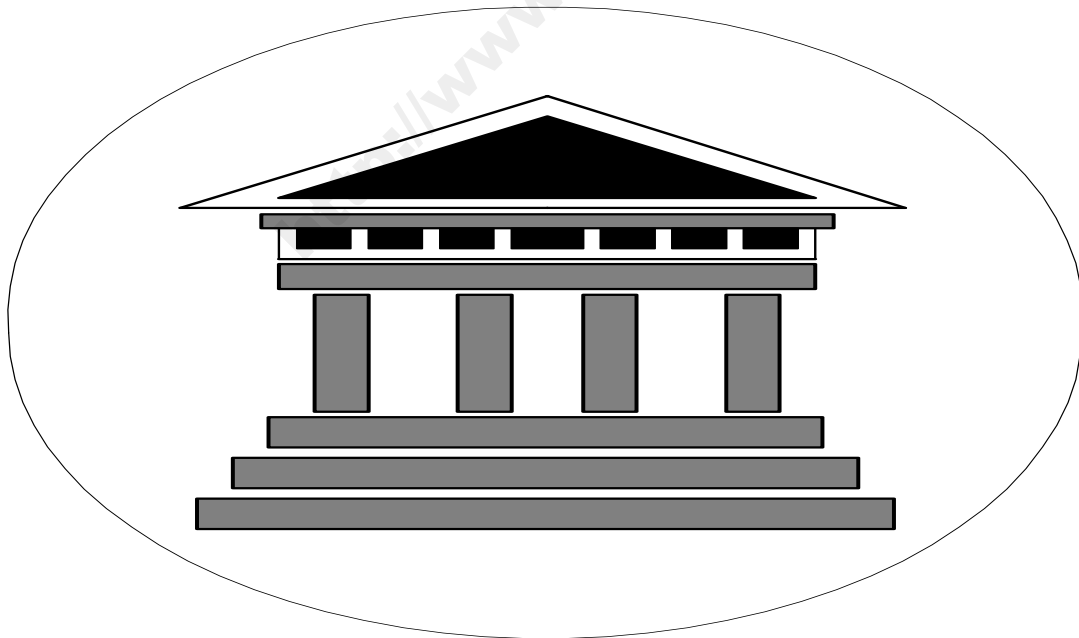


Katalog BPS : 9202.

**NERACA PEMERINTAHAN UMUM
INDONESIA**

***GENERAL GOVERNMENT ACCOUNTS
OF INDONESIA***

2001 - 2006



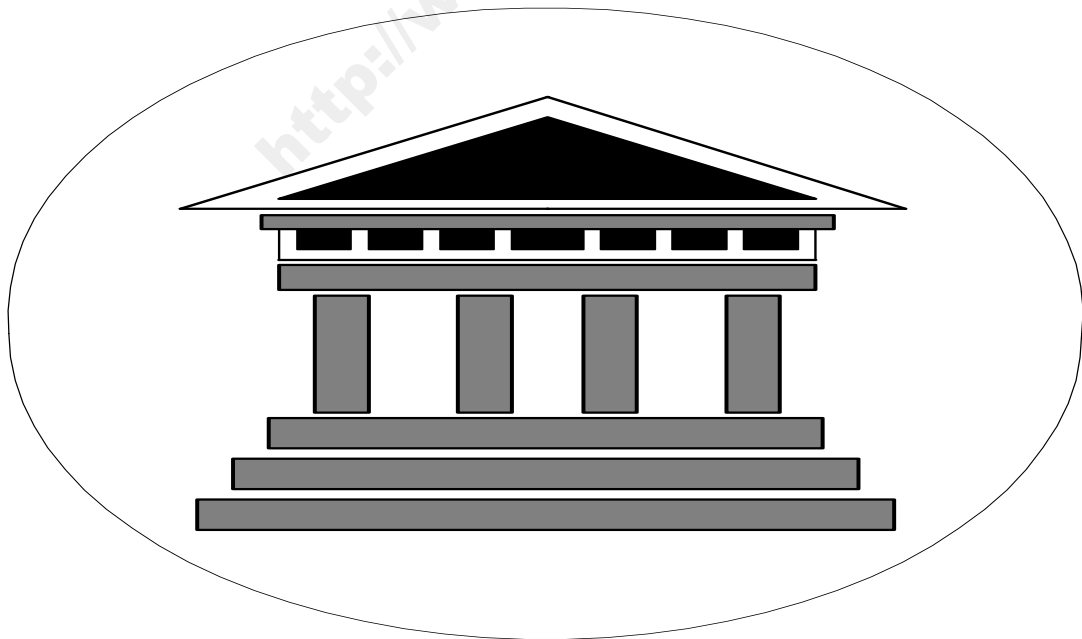
BPS

Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

**NERACA PEMERINTAHAN UMUM
INDONESIA**

***GENERAL GOVERNMENT ACCOUNTS
OF INDONESIA***

2001-2006



KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2001-2006 ini merupakan publikasi lanjutan dari publikasi sebelumnya yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa perbaikan telah dilakukan dalam publikasi ini baik mengenai konsep dan definisi maupun metode estimasi yang digunakan, terutama disebabkan oleh perkembangan data yang tersedia. Seperti publikasi sebelumnya, dalam publikasi ini disajikan neraca pemerintahan umum menurut tingkatannya, yaitu : Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.

Tabel-tabel dalam publikasi ini memuat angka-angka Neraca Pemerintahan Umum tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, yang disajikan dalam bentuk nilai rupiah, persentase maupun grafik. Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai ketiga neraca yang disajikan, maka dalam publikasi ini juga diuraikan konsep dan definisi masing-masing rincian neraca tersebut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran dari para pembaca dan pemakai data sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2007

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

DR. RUSMAN HERIAWAN
NIP: 340003999

PREFACE

This general government accounts of Indonesia 2001-2006 publication is the latest of its kind. In this publication, some improvements have been made due to the availability of new data, especially those related to concepts and definitions as well as methods of estimation. As in the previous publications, the general government account data are presented in detail according to administrative levels: Central, Provincial, Regency and Village.

Tables in this publication covers data for the years 2001-2006 and presented in the form of absolute values, percentages, and graphics. Concepts and definitions related to the characteristics are also available to avoid misinterpretation.

Finally, to those who have contributed to the successful completion of this publication, we express our thanks. Criticisms and suggestions for the improvement on the forthcoming publications will be appreciated. We hope this book will prove useful.

Jakarta, December 2007
BPS - STATISTICS INDONESIA

DR. RUSMAN HERIAWAN
Director General

DAFTAR ISI / CONTENTS

	Halaman
KATA PENGANTAR / <i>PREFACE</i>	i/ <i>ii</i>
DAFTAR ISI / <i>CONTENTS</i>	iii
DAFTAR TABEL / <i>TABLES</i>	v
DAFTAR GRAFIK / <i>GRAPHS</i>	vii
DAFTAR LAMPIRAN / <i>APPENDIX</i>	ix
I PENDAHULUAN / <i>INTRODUCTION</i>	1/ <i>47</i>
II KONSEP DAN DEFINISI / <i>CONCEPTS AND DEFINITIONS</i>	5/ <i>49</i>
2.1 Neraca Produksi Pemerintahan Umum / <i>Production Account of General Government</i>	13/ <i>53</i>
2.2 Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Umum / <i>Income and Outlay Account of General Government</i>	17/ <i>57</i>
2.3 Neraca Modal Pemerintahan Umum / <i>Capital Transactions Account of General Government</i>	23/ <i>62</i>
III ANALISIS DESKRIPTIF BEBERAPA KOMPONEN NERACA PEMERINTAHAN UMUM 2000-2005 / <i>DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE ACCOUNTS' COMPONENTS 2001-2006</i>	27/ <i>67</i>
3.1 Belanja Barang / <i>Purchase of Goods</i>	30/ <i>68</i>
3.2 Belanja Pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	30/ <i>68</i>
3.3 Pengeluaran Konsumsi / <i>Consumption Expenditure</i>	32/ <i>69</i>
3.4 Tabungan Bruto / <i>Gross Savings</i>	35/ <i>70</i>
3.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	37/ <i>70</i>
3.6 Subsidi / <i>Subsidies</i>	39/ <i>71</i>
3.7 Pajak / <i>Taxes</i>	41/ <i>71</i>
LAMPIRAN-LAMPIRAN / <i>APPENDIX</i>	75

DAFTAR TABEL / *TABLES*

		Halaman
Tabel 2.1	Diagram Neraca Produksi Neraca Pemerintahan Umum	8
<hr/>		
	<i>Table 2.1 General Government Production Accounts Diagram</i>	8
Tabel 2.2	Diagram Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Neraca Pemerintahan Umum	8
<hr/>		
	<i>Table 2.2 General Government Income and Outlay Accounts Diagram</i>	8
Tabel 2.3	Diagram Neraca Modal Neraca Pemerintahan Umum	8
<hr/>		
	<i>Table 2.3 General Government Capital Accounts Diagram</i>	8
Tabel 3.1	Persentase Komponen - Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum	28
<hr/>		
	<i>Table 3.1 Percentage of Items of General Government Account To The Total General Government Revenue</i>	28
Tabel 3.2	Persentase Komponen - Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Produk Domestik Bruto	31
<hr/>		
	<i>Table 3.2 Percentage of Items of General Government Account To The Gross Domestic Product</i>	31
Tabel 3.3	Persentase Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintahan Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional	33
<hr/>		
	<i>Table 3.3 Percentage of General Government Gross Saving and Gross Fixed Capital Formation</i>	33
Tabel 3.4	Proporsi Belanja Barang Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	35
<hr/>		
	<i>Table 3.4 Proportion of General Government Material Expenditure By Level of Government</i>	35
Tabel 3.5	Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	38
<hr/>		
	<i>Table 3.5 Proportion of General Government Compensation of Employees By Level of Government</i>	38 7

Tabel 3.6	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	39
<hr/>			
<i>Tabel 3.6</i>	<i>Proportion of General Government Consumption Expenditure By Level of Government</i>		
Tabel 3.7	Proporsi Tabungan Bruto Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	41
<hr/>			
<i>Tabel 3.7</i>	<i>Proportion of General Government Gross Savings By Level of Government</i>		
Tabel 3.8	Proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto Pemerintahan Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	43
<hr/>			
<i>Tabel 3.8</i>	<i>Proportion of General Government Gross Fixed Capital Formation By Level of Government</i>		
Tabel 3.9	Proporsi Penerimaan Pajak Pemerintahan Umum Menurut Tingkat Pemerintahan		45
<hr/>			
<i>Tabel 3.9</i>	<i>Proportion of General Government Total Tax Revenue By Level of Government</i>		

DAFTAR GRAFIK / *GRAPHS*

	Halaman
Grafik 3.1.a Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum	
<i>Graph 3.1.a Percentage of Items of General Government Account to The Total General Government Revenue</i>	29
Grafik 3.1.b Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum	
<i>Graph 3.1.b. Percentage of Items of General Government Account To Total The Government Revenue</i>	29
Grafik 3.2 Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Produk Domestik Bruto	
<i>Graph 3.2 Percentage of Items of General Government Account To The Gross Domestic Product</i>	32
Grafik 3.3 Persentase Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional	
<i>Graph 3.3 Percentage of Government Saving and Government Capital Formation To Total Gross Fixed Capital Formation</i>	34
Grafik 3.4 Proporsi Belanja Barang Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	
<i>Graph 3.4 Proportion of General Government Material Expenditure By Level of Government</i>	36
Grafik 3.5 Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	
<i>Graph 3.5 Proportion of General Government Compensation of Employees By Level of Government</i>	38
Grafik 3.6 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	
<i>Graph 3.6 Proportion of General Government Consumption Expenditure By Level of Government</i>	40
Grafik 3.7 Proporsi Tabungan Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan	
<i>Graph 3.7 Proportion of General Government Gross Savings By Level of Government</i>	42
Grafik 3.8 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Menurut	

Tingkat Pemerintahan

<u>Graph 3.8.</u>	<u><i>Proportion of General Government Gross Fixed Capital Formation By Level of Government</i></u>	43
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Grafik 3.9 Proporsi Penerimaan Pajak Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan

<u>Graph 3.9</u>	<u><i>Proportion of General Government Total Tax Revenue By Level of Government</i></u>	45
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN / *APPENDIX*

		Halaman
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	1.a	Neraca Produksi Pemerintahan Umum / <i>Production Accounts of General Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 75
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	1.b	Neraca Produksi Pemerintahan Pusat / <i>Production Accounts of Central Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 76
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	1.c	Neraca Produksi Pemerintahan Daerah Propinsi / <i>Production Accounts of Provincial Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 77
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	1.d	Neraca Produksi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / <i>Production Accounts of Regencial Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 78
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	1.e	Neraca Produksi Pemerintahan Desa / <i>Production Accounts of Village Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 79
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	2.a	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Umum / <i>Income and Outlay Accounts of eneral Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 80
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	2.b	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Pusat / <i>Income and Outlay Accounts of Central Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 82
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	2.c	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Daerah Propinsi/ <i>Income and Outlay Accounts of Provincial Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 84
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	2.d	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ <i>Income and Outlay Accounts of Regencial Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 86
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	2.e	Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Desa / <i>Income and Outlay Accounts of Village Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 88
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	3.a	Neraca Modal Pemerintahan Umum / <i>Capital Accounts of General Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 90
<u>Tabel</u> <i>Table</i>	3.b	Neraca Modal Pemerintahan Pusat / <i>Capital Accounts of Central Government</i> , Tahun / <i>Year</i> : 2001-2006 91

<u>Tabel</u> <u>Table</u>	3.c	Neraca Modal Pemerintahan Daerah Propinsi / <i>Capital Accounts of Provincial Government</i> , Tahun / <i>Year</i> . 2001-2006	92
<u>Tabel</u> <u>Table</u>	3.d	Neraca Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / <i>Capital Accounts of Regencial Government</i> , Tahun / <i>Year</i> . 2001-2006	93
<u>Tabel</u> <u>Table</u>	3.e	Neraca Modal Pemerintahan Desa / <i>Capital Accounts of Village Government</i> , Tahun / <i>Year</i> . 2001-2006	94

<http://www.bps.go.id>



I. PENDAHULUAN

Sektor pemerintah umum di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh lembaga dan instansi negara, baik yang ada di pusat maupun unit vertikalnya di daerah. Sedangkan pemerintah daerah mencakup seluruh unit pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pelaksanaan dan kebijakan pembangunan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah adalah merupakan suatu tatanan yang integral dari pembangunan nasional. Oleh karenanya keberhasilan pembangunan di pusat dan di daerah merupakan wujud keberhasilan pembangunan secara nasional.

Kebijaksanaan keuangan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai saat ini didasarkan pada prinsip anggaran cara terpadu, dengan upaya terus memupuk

terbentuknya tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah merupakan selisih dari penerimaan negara dan pengeluaran/belanja negara. Salah satu penggunaan yang bersumber dari tabungan pemerintah ini adalah pembiayaan aparatur pemerintah yang meliputi belanja pegawai pusat dan belanja pegawai daerah. Belanja pegawai baik pusat maupun daerah yang semakin meningkat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas aparatur pemerintah, serta diharapkan mampu pula untuk mendorong meningkatnya efisiensi pembangunan ekonomi nasional.

Berbagai sumbangan dan bantuan kepada daerah merupakan penjabaran dari kemauan politik pemerintah pusat dalam upaya mendorong pemerintah daerah untuk lebih mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dalam bidang-bidang yang menjadi urusan rumah

tangganya sendiri. Kebijakan bantuan keuangan tersebut diarahkan untuk mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan yang serasi antara pusat dan daerah, dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis. Salah satu upaya dalam memobilisasi dana pembangunan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah sendiri (PDS) yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) baik di daerah tingkat I maupun di daerah tingkat II, sehingga diharapkan bantuan pemerintah pusat kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II akan semakin berkurang.

Pemerintah suatu negara adalah konsumen dan sekaligus produsen yang besar. Di tangan pemerintah juga biasanya terletak kendali finansial negara. Karena itu segala tindakan pemerintah yang menyangkut ketiga macam kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang besar atas kegiatan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dalam GBHN disebutkan bahwa salah satu ciri dari demokrasi ekonomi

yang dianut di Indonesia adalah pengertian bahwa negara memegang peranan yang sangat besar dalam pengelolaan ekonomi, yang berarti bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengelola perekonomian akan dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, tetapi sebaliknya seluruh bangsa akan ikut menanggung kalau pembangunan tidak berhasil.

Bahwa keberhasilan ekonomi tidak terlepas daripada perencanaan yang seksama adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal, padahal perencanaan yang baik harus berlandaskan data yang lengkap, terpercaya dan berkesinambungan termasuk data dari sektor pemerintah. Cara yang lazim digunakan untuk menyusun data statistik sektor pemerintah antara lain dengan menyajikannya dalam bentuk suatu neraca baku.

Publikasi ini khusus menyajikan neraca pemerintahan umum. Bagian pertama secara keseluruhan terdiri dari konsep dan definisi serta hasil pengolahan tiga perangkat neraca, yaitu: neraca produksi, neraca penerimaan dan

pengeluaran, dan neraca modal. Data yang disajikan dalam neraca pemerintahan umum ini meliputi data tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, sehingga analisisnya juga terbatas pada periode tersebut. Sedang bagian kedua berisi analisis agregasi mengenai tiga jenis neraca yang ada pada bagian pertama.

Konsep dan definisi serta klasifikasi yang digunakan dalam menyusun publikasi ini didasarkan atas bentuk baku dari PBB yang dituangkan dalam buku "*Draft Manual on Public Sector Statistics*," terbitan bulan Februari 1979.



II. KONSEP DAN DEFINISI

Di banyak negara, pemerintah pada berbagai tingkat mempunyai peranan yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, banyak pihak misalnya pembuat keputusan, pembuat undang-undang, peneliti, pengamat, wartawan, dan rakyat perlu untuk mengetahui tentang taraf dan arah pertumbuhan dari sektor pemerintah. Salah satu statistik pada tingkat makro yang banyak hubungannya dengan pengukuran kegiatan pemerintah tersebut adalah neraca sektor publik, yaitu salah satu bagian dari sistem neraca nasional.

Dilihat dari sudut aktivitas maka sektor publik dibedakan dalam dua kelompok yaitu kelompok pemerintahan umum dan kelompok badan usaha negara. Pemerintahan umum pada dasarnya mencakup semua departemen dan non departemen, badan dan lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan

badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dan pertahanan, dan semua pengadaan pelayanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang tidak ditarik pembayaran atau pembayarannya di bawah biaya produksi¹. Juga dicakup:

- a. Badan-badan yang tidak mencari untung, seperti sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, museum, perpustakaan dan tempat-tempat penyimpanan hasil karya seni, yang dibiayai dari keuangan pemerintah,
- b. Instansi pemerintah yang memproduksi barang dan jasa sejenis dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan swasta yang berkaitan erat dengan kegiatan instansi tersebut, dan keuangannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan utama instansi itu, seperti unit-unit percetakan di kantor-kantor

1. Definisi tersebut sesuai dengan definisi yang dipakai oleh UN. Lihat United Nations, Draft Manual on Public Sector Statistics, United Nations, Februari, 1979

pemerintah yang menjual publikasi, kartu pos bergambar dan reproduksi karya seni, pembibitan tanaman dari kebun percobaan, dan lain-lain penjualan yang dimaksud di sini hanya bersifat insidental dari fungsi pokok lembaga tersebut,

- c. Instansi yang menyediakan pelayanan finansial tetapi tidak berwenang untuk melakukan transaksi finansial sendiri.

United Nations menyarankan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam seperangkat neraca yang terdiri dari neraca produksi, neraca penerimaan dan pengeluaran, dan neraca modal².

Yang dimaksud dengan **neraca produksi pemerintahan umum** adalah neraca yang memuat transaksi mengenai aktivitas produksi pemerintah umum. Sisi kanan dari neraca produksi memuat perincian-perincian produksi yang dikonsumsi sendiri, penerimaan dari produksi yang berupa barang dan penerimaan dari jasa yang diberikan. Total keluaran (output) merupakan penjumlahan dari ketiga perincian tadi. Sedang sisi kiri

dari neraca produksi memuat perincian belanja barang, belanja pegawai, konsumsi barang modal (penyusutan), dan pajak tak langsung neto, yang jumlahnya merupakan total masukan (input) dari sektor pemerintah umum. Sebagai faktor penyeimbang dalam neraca produksi pemerintahan umum ini adalah perincian produksi yang dikonsumsi sendiri³.

Neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintahan umum

menyajikan semua transaksi terkecuali transaksi modal yang dilakukan oleh pemerintah umum. Sisi sebelah kanan memuat penerimaan pemerintah umum yang terdiri dari laba bersih, penerimaan dari harta, pajak langsung, pajak tak langsung dan lain-lain penerimaan pemerintah umum. Sedangkan sisi kiri memuat pengeluaran pemerintah umum yang terdiri dari pengeluaran konsumsi, pembayaran bunga, pemberian subsidi, bantuan sosial, bantuan pemerintah umum berupa transfer lancar kepada pihak lain, dan tabungan. Sebagai faktor penyeimbang dalam neraca penerimaan dan pengeluaran

²Ibid

3. Dalam penyusunan suatu neraca pada tingkat makro, selalu ada suatu perincian yang berfungsi menyamakan jumlah sisi kiri dengan jumlah sisi kanan.

pemerintah umum ini adalah tabungan.

Neraca modal pemerintahan umum adalah neraca yang memperlihatkan transaksi modal dan pembiayaannya, antara pemerintah dan badan-badan lain (termasuk luar negeri). Pada sisi kiri neraca tercantum nilai dari barang modal pemerintah umum yang terdiri dari perubahan stok, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pembelian tanah neto, pembelian barang-barang modal yang tidak berwujud dan transfer modal ke sektor lain atau ke luar negeri. Pada sisi kanan dicantumkan sumber dana yang dipakai untuk pembelian barang-barang modal di sebelah kiri tadi, yang antara lain berasal dari tabungan, penyusutan barang modal, transfer, dan pinjaman neto (sebagai faktor penyeimbang).

Penyusunan ketiga macam neraca di atas diperlukan karena dalam banyak analisis ekonomi makro sering dihubungkan antara produksi dengan pengeluaran untuk konsumsi serta pengeluaran untuk investasi. Seperti telah diterangkan sebelumnya ada komponen di satu neraca yang merupakan komponen juga di salah

satu neraca lain, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga neraca saling berkaitan. Untuk menggambarkan kesalingterkaitan antara ketiga macam neraca pemerintahan umum yang telah diuraikan terdahulu, di halaman berikut ini diberikan contoh sederhana (lihat diagram pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3).

Misalnya perincian produksi yang dikonsumsi sendiri (nomor 3 pada neraca produksi) yang merupakan faktor penyeimbang dalam neraca tersebut, kemudian pada neraca penerimaan dan pengeluaran perincian tersebut muncul kembali sebagai pengeluaran konsumsi di sisi kiri (nomor 5). Begitu juga perincian penyusutan barang modal (nomor 2) di sisi kiri neraca produksi akan muncul dalam neraca modal sebagai salah satu sumber dana pembentukan modal (nomor 11). Perincian tabungan dalam neraca penerimaan dan pengeluaran (nomor 6) yang merupakan perincian penyeimbang dalam neraca tersebut muncul kembali di sebelah kanan neraca modal sebagai sumber dana pembentukan modal (nomor 12). Semua transaksi yang ditulis dalam neraca pemerintah ini adalah transaksi dalam suatu periode tertentu misalnya

tahunan atau triwulanan.

pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Dalam menyusun neraca pemerintahan umum Indonesia, sektor pemerintah umum dibagi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun dinas vertikalnya di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah propinsi,

Tabel Diagram Neraca Produksi Pemerintahan Umum

Table : 2.1 General Government Production Accounts Diagram

1. Belanja barang dan belanja pegawai / Material expenditure and compensation of employees	3. Produksi yang dikonsumsi sendiri (5) / Production for own consumption
2. Penyusutan Barang Modal (11) / Consumption of fixed Capital	4. Penerimaan dari jasa dan produksi barang / Non commodities sales and commodities produced
Jumlah biaya / Total Input	Jumlah produksi / Total Output

Tabel Diagram Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Umum

Table : 2.2 General Government Income and Outlay Accounts Diagram

5. Pengeluaran konsumsi (3) / Final consumption expenditure	7. Pajak dan lain-lain / Taxes and other revenues
6. Tabungan (12) / Savings	8. Transfer (neto) / Net transfer
Jumlah pengeluaran / Total Disbursement	Jumlah penerimaan / Total Receipts

Tabel : 2.3 Diagram Neraca Modal Pemerintahan Umum

Table

**General Government Capital Accounts
Diagram**

9. Perubahan Stok / <i>Increase in stock</i>	11. Penyusutan Barang Modal (2) / <i>Consumption of fixed Capital</i>
10. Pembentukan modal tetap bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	12. Tabungan / <i>Savings</i>
Jumlah pembentukan modal / <i>Total Capital Formation</i>	Jumlah pembiayaan modal / <i>Total Finance of acumulation</i>

Kegiatan pemerintah adalah menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan penduduk, mengatur kebijaksanaan perekonomian negara dan lain-lain. Dengan demikian kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya baik dalam ciri struktur biaya maupun dalam sumber pembelanjannya. Karena kegiatan pemerintah sulit diukur, maka pendekatan yang dipakai dalam menilai produksi sektor pemerintah adalah pendekatan pengeluaran di mana keluaran sama dengan masukan. Produksi sektor pemerintah sebagian besar digunakan oleh pemerintah sendiri sebagai konsumsi akhir. Dan struktur biaya sektor pemerintah tidak memuat unsur surplus usaha, sehingga balas jasa pegawai merupakan suatu

bagian penting dalam nilai tambah.

Sumber pendapatan dan biaya atau pembelanjaan dari kegiatan pemerintah umum di Indonesia adalah "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah," disingkat dengan APBN dan APBD. Dalam APBN dan APBD ini terdapat tiga kelompok anggaran yaitu pertama kelompok pendapatan/penerimaan, kedua kelompok belanja/pengeluaran dan ketiga kelompok pembiayaan.

Dalam uraian berikut ini akan dijelaskan tiga kelompok anggaran tersebut.

2.1 Pendapatan/Penerimaan

Untuk pemerintah pusat meliputi penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak (PNBP) terdiri dari penerimaan sumber

daya alam (SDA) seperti penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan; bagian pemerintah pusat atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PNBP lainnya seperti penerimaan dari lembaga/ departemen yaitu penerimaan pendidikan, kesehatan, kejaksaan dan pengadilan, luar negeri dan lain-lain.

Untuk pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Setelah itu Dana Perimbangan yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2 Belanja/Pengeluaran

Terjadi perubahan format di sisi belanja yang mulai dilaksanakan dalam penyusunan RAPBN/D 2005, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang *K e u a n g a n N e g a r a* . Perubahan-perubahan yang diterapkan pada intinya: (1) melaksanakan sistem penganggaran secara terpadu (unified

budget), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan; dan (2) mereklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya menurut sektor dan jenis belanja. Tujuan perubahan format adalah sebagai berikut: Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui: (a) meminimalisasikan duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan (b) meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang dicapai dengan penganggaran organisasi. Kedua, menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional.

Dalam format baru, belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Khusus untuk belanja pemerintah pusat, perubahan pokok sebagai akibat penyempurnaan format APBN, antara lain sebagai berikut: (a) Dengan sistem penganggaran yang terpadu (unified budget), rincian belanja negara menurut jenis belanja (ekonomi)

tidak lagi memisahkan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. (b) Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan kementerian negara/lembaga yang ada, dan akan termuat dalam UU APBN. (c) Rincian belanja menurut jenis (tidak termasuk belanja pembangunan) terdiri dari 5 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja rutin lainnya. Dalam format yang baru ditambah lagi dengan 3 jenis belanja yang baru, yaitu belanja modal, belanja hibah, dan bantuan sosial. (d) Pengeluaran pembangunan dalam format lama dikonversikan dalam format baru dan terdistribusikan seluruhnya ke dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Sementara itu, rincian belanja menurut fungsi merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format lama merupakan rincian dari sektor/subsektor. Meskipun merupakan reklasifikasi, namun program-program dalam format baru (*unified budget*) tidak bisa dipersandingkan dengan program-program dalam format lama,

karena terdapat perbedaan program. Fungsi/subfungsi bukan merupakan dasar pengalokasian anggaran. Pengalokasian dalam format APBN yang baru didasarkan pada program-program yang diusulkan oleh kementerian negara/lembaga. Selanjutnya, program-program tersebut dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan subfungsinya. Dengan demikian, rincian anggaran belanja menurut fungsi adalah merupakan kompilasi dari anggaran program-program kementerian negara/lembaga. Selanjutnya, rincian belanja negara menurut fungsi hanya merupakan alat analisis (*tools of analysis*) yang digunakan untuk menganalisa fungsi-fungsi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan *international best practices*. Dalam hal ini Indonesia telah mengacu pada *Classification of the Functions of Government (COFOG)* yang disusun oleh UN (*United Nations Statistics Division*) dan diadopsi oleh *Government Finance Statistics (GFS) manual 2001-IMF (International Monetary Fund)*, dan hanya sedikit berbeda dengan memisahkan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya dan agama (*recreation, culture, and religion*). Dengan demikian, dalam APBN rincian

belanja negara menurut fungsi terdiri dari 11 fungsi dengan rincian: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Sementara untuk pemerintah daerah rincian belanja juga hampir sama yaitu terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Biaya Pemeliharaan, Belanja lain-lain dan Belanja Modal.

2.3 Pembiayaan

Dalam rangka mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, maka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pembiayaan luar negeri secara bertahap diupayakan untuk dapat dikurangi. Sebaliknya, kebutuhan pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang, sedapat mungkin bisa diupayakan untuk

dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri. Hal ini, terutama dimaksudkan untuk menunjang langkah-langkah konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN dalam mendukung terwujudnya ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*). Kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, pada dasarnya dititik beratkan pada 3 (tiga) strategi pokok, yaitu: (i) peningkatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri; (ii) penurunan stock utang secara bertahap; dan (iii) pemenuhan kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.

Dari data yang tertera dalam APBN dan APBD ini dapat disusun seperangkat neraca pemerintahan umum menurut tingkat pemerintahan yaitu pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa, yang terdiri dari tiga macam neraca yaitu :

- (a) Neraca produksi pemerintahan umum
- (b) Neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintahan umum, dan
- (c) Neraca modal pemerintahan umum.

Sumber data yang digunakan dalam menghitung komponen-komponen ketiga neraca ini untuk pemerintah pusat adalah data realisasi APBN pemerintah pusat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. Sedangkan untuk pemerintah daerah adalah dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan desa yang setiap tahun dikumpulkan oleh BPS melalui aparatnya di daerah, serta realisasi APBD Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota seluruh propinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Departemen Keuangan.

2.4. Neraca Produksi Pemerintahan Umum

Seperti telah diterangkan sebelumnya, produksi sektor pemerintah sulit diukur nilainya, karena kegiatan pemerintah pada umumnya berupa pelayanan jasa kepada masyarakat yang tidak diperjualbelikan di pasar. Oleh sebab itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlakukan

sebagai suatu unit produksi yang mengkonsumsi sebagian besar dari produksinya. Bagian produksi yang dikonsumsi sendiri itu diperoleh dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi dan jasa pelayanan yang diberikan.

Neraca produksi pemerintahan umum menggambarkan biaya-biaya di sebelah kiri dan produksi di sebelah kanan. Biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah umum dalam penyediaan jasa untuk masyarakat, terdiri dari belanja barang, belanja pegawai dan penyusutan serta pajak tak langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi adalah produksi yang dikonsumsi sendiri, pendapatan dari hasil penjualan barang-barang yang diproduksi dan jasa yang diberikan. Berikut ini dijelaskan masing-masing perincian yang ada dalam neraca produksi pemerintahan umum.

a. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah umum untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses

produksi.

Pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja barang tersebut terdiri dari:

1. Pembelian alat-alat tulis, barang cetakan dan alat-alat rumah tangga kantor,
2. Sewa gudang dan kantor,
3. Biaya pengepakan, pengiriman, dan penyimpanan barang,
4. Bahan makanan (biaya rapat),
5. Biaya penerimaan tamu,
6. Biaya listrik, telepon, teleks, dan air bersih,
7. Biaya pemeliharaan (gedung dan kantor, kendaraan dan inventaris kantor),
8. Biaya perjalanan dinas,
9. Pengeluaran rutin lainnya (belanja lain-lain).

Sedangkan untuk pemerintah daerah pada prinsipnya sama dengan pemerintah pusat, tetapi dibedakan menurut belanja langsung yang disebut juga dengan belanja pelayanan publik dan belanja tidak langsung (belanja aparatur daerah). Rincian belanja tersebut adalah biaya barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan belanja lain-lain.

b. Balas Jasa Pegawai

Balas jasa pegawai yang dicakup di sini terdiri dari unsur-unsur :

1. Upah dan gaji dalam bentuk uang,
2. Upah dan gaji dalam bentuk barang,
3. Iuran untuk dana jaminan sosial (*social security schemes*),
4. Iuran untuk dana pensiun, dan
5. Asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, tabungan hari tua dan lain-lain yang sejenisnya.

Upah dan gaji dalam bentuk uang

meliputi gaji pokok beserta tunjangan, seperti tunjangan liburan serta tunjangan-tunjangan selama tidak hadir sementara karena sakit, tunjangan biaya hidup, dan sebagainya, juga termasuk uang lembur, honor, bonus khusus, dan lain-lain. Akan tetapi setiap pembayaran yang dilakukan oleh karyawan untuk membeli alat kerja, perlengkapan atau pakaian khusus, berdasarkan perjanjian tidak dianggap sebagai bagian dari upah dan gaji.

Upah dan gaji dalam bentuk barang

untuk pegawai negeri sipil, TNI dan Polri terdiri dari beras, gula, pakaian jadi, sedangkan untuk TNI dan Polri termasuk juga lauk pauk, pakaian

seragam, perumahan keluarga dan lain-lain. Upah dan gaji berupa barang ini bisa saja diberikan secara cuma-cuma atau dibeli dengan harga rendah. Iuran jaminan sosial adalah sumbangan yang disediakan pemerintah untuk pegawainya baik pegawai sipil maupun TNI dan Polri. Unsur yang terakhir ialah iuran yang direncanakan oleh majikan yang dalam hal ini pemerintah untuk keperluan bantuan pensiun, bantuan keluarga, asuransi kecelakaan dan kesehatan, asuransi jiwa dan bantuan yang sejenis yang memberikan keuntungan bagi pegawai/karyawan.

c. Penyusutan Barang Modal

Penyusutan barang modal adalah penyisihan pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru, karena barang modal yang lama pada suatu saat tidak dapat berfungsi seperti biasa lagi. Biasanya penyisihan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan nilai beli barang-barang modal yang dipakai. Dalam neraca produksi pemerintahan umum karena datanya tidak tersedia, maka digunakan angka taksiran, yaitu sebesar 20 persen dari pembentukan

modal pemerintah umum yang berasal dari total belanja modal.

d. Pajak Tak Langsung Neto

Pajak tak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi. Pajak tak langsung yang dibayar pemerintah umum hanya pajak atau retribusi atas kegiatan di sektor *real estate* dan pajak atas *commodities produced*. Data mengenai pajak tak langsung neto yang dibayarkan pemerintah umum sampai sekarang belum tersedia, sehingga perincian ini masih kosong.

Semua pengeluaran yang dimaksud di sini mencakup pengeluaran yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri oleh pemerintah umum.

e. Produksi yang Dikonsumsi Sendiri

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa keluaran/output sektor pemerintah umum tidak dapat dinilai secara langsung, sehingga nilai **produksi yang dikonsumsi sendiri (output non pasar)** diperoleh dengan mengurangi total input pemerintah umum di sebelah

kiri neraca produksi pemerintah umum dengan penerimaan dari jasa dan hasil produksi berupa barang yang dihasilkan sektor pemerintah umum.

f. Penerimaan dari Jasa

Yang dimaksud dengan **penerimaan dari jasa** adalah penerimaan pemerintah umum dari kegiatan jasa yang disediakan untuk masyarakat. Yang termasuk dalam kategori penerimaan dari jasa pada pemerintahan pusat adalah:

1. Penerimaan pendidikan yaitu penerimaan pemerintah umum yang bersumber dari hasil kegiatan sekolah-sekolah negeri seperti uang pendidikan, uang ujian sekolah, uang pendaftaran, dan uang ujian menjalankan praktik dan uang pendidikan lainnya,
2. Pendapatan/penerimaan dari jasa I yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan dari rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya yang diusahakan oleh pemerintah umum,
 - b. Penjualan karcis dan biaya masuk ke tempat-tempat hiburan yang diusahakan oleh pemerintah umum,
 - c. Penerimaan jasa tenaga kerja dan pekerjaan,

- d. Penerimaan dari pengurusan surat keterangan,
 - e. Penerimaan dari jasa pertanahan,
 - f. Penerimaan dari hak perizinan,
 - g. P e n e r i m a a n d a r i sensor/pemeriksaan,
 - i. P e n e r i m a a n d a r i jasa bandara/pelabuhan laut,
3. Setengah (50 persen) dari sewa, penggantian benda-benda tak bergerak seperti rumah dinas, rumah negara, benda-benda bergerak, seperti alat-alat besar dan sebagainya dan benda tak bergerak lainnya,
 4. Setengah (50 persen) dari penerimaan bukan pajak (PNBP) dari luar negeri, dan
 8. Dua puluh persen dari penerimaan lain-lain pada PNBP lainnya.

Sedangkan untuk pemerintah daerah berasal dari penerimaan lain-lain dari PAD yang sah.

g. Produksi Berupa Barang

Perincian **produksi berupa barang** ini adalah penjualan dari barang-barang yang diproduksi oleh semua unit-unit pemerintahan umum. Umumnya barang-barang tersebut merupakan produksi sambilan dari kegiatan sektor

pemerintah umum yang baik keuangan maupun kegiatan proses produksinya tidak dapat dipisahkan dari organisasi induknya. Barang-barang yang dihasilkan itu umumnya diproduksi juga oleh perusahaan-perusahaan lain dan dijual dengan harga yang sama dengan barang-barang serupa yang ada di pasar. Barang-barang hasil produksi pemerintah pusat adalah:

1. Penjualan hasil produksi/sitaan yang terdiri dar:
 - a. P e n j u a l a n h a s i l pertanian/perkebunan,
 - b. Penjualan hasil peternakan,
 - c. Penjualan hasil pertambangan,
 - d. Penjualan hasil penangkapan perikanan,
 - e. Penjualan informasi, penerbitan, potret, film, poster, gambar dan peta,
 - f. Penjualan obat-obatan/farmasi, vaksinasi, dan hasil farmasi lainnya,
 - g. Penjualan dokumen pelelangan,
2. Setengah (50 persen) dari pendapatan/penerimaan dari sewa, benda-benda tak bergerak seperti rumah dinas, rumah negara, benda-benda bergerak, seperti alat-alat besar dan sebagainya dan benda tak bergerak lainnya,
3. Dua puluh persen dari penerimaan

lain-lain pada PNBPN lainnya.

Untuk pemerintah daerah produksi berupa barang ini adalah merupakan bagian dari penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan dari jasa dan produksi barang dari pemerintah umum ini disebut juga dengan istilah output pasar dari pemerintah umum.

Apabila perincian e, f dan g ini dijumlahkan akan diperoleh total output/keluaran (total produksi) pemerintahan umum.

2.5. Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Umum

Dalam **neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintahan umum** disajikan semua transaksi *current* yang dilakukan oleh pemerintah umum. Transaksi yang dilakukan oleh pemerintah umum mencakup transaksi antar pemerintah umum sendiri, transaksi pemerintah umum dengan swasta, transaksi pemerintah umum dengan badan-badan usaha negara, transaksi pemerintah umum dengan rumah tangga, dan transaksi pemerintah umum dengan luar negeri.

Pada sisi kanan neraca disajikan semua penerimaan pemerintah umum yang dikelompokkan menurut jenis penerimaan seperti, laba bersih, *property income*, pajak langsung, pajak tak langsung dan lain-lain penerimaan pemerintah umum. Sisi kiri neraca ini berisikan semua pengeluaran pemerintah umum yang telah dikelompokkan menjadi pengeluaran konsumsi, pembayaran bunga, pemberian subsidi, bantuan sosial, transfer dan tabungan. Yang disebut terakhir adalah perincian penyeimbang neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintahan umum. Perincian-perincian yang dimaksud dalam neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintahan umum adalah sebagai berikut:

a. Laba Bersih

Laba bersih adalah keuntungan bersih perusahaan/usaha yang berada di lembaga/departemen (*departmental enterprises*) baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diserahkan kepada pemerintah umum. Karena perusahaan semacam ini, misalnya percetakan yang berada di lembaga/departemen/dinas pemerintah

umum, pembukuannya tidak bisa dipisahkan dengan pembukuan pemerintah umum sehari-hari, maka perusahaan tersebut dianggap menyatu dengan pemerintah umum, sehingga nilai laba bersih dianggap sama dengan nol.

b. Penerimaan Kekayaan

Penerimaan kekayaan adalah penerimaan pemerintah umum yang berasal dari kekayaan yang dimiliki pemerintah umum, yang terdiri dari tiga jenis penerimaan: (1) bunga, (2) laba saham, (3) sewa tanah dan royalti. Dalam hal tanah bengkok, perlakuannya tanpa memandang apakah tanah tersebut dikerjakan sendiri atau disewakan pada pihak lain, tetap dimasukkan pada perincian ini.

Yang dicakup dalam penerimaan kekayaan adalah :

1. Pendapatan bunga atas investasi dalam negeri dan obligasi,
2. Laba saham dari badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/D),
3. Penerimaan dari SDA yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan dari minyak bumi
 - b. Penerimaan dari gas alam

- c. Penerimaan dari pertambangan umum (iuran tetap tetap dan royalti)
- d. Penerimaan dari kehutanan (dana reboisasi, sumber daya hutan, iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dana pengamanan hutan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran menangkap satwa liar)
- e. Penerimaan dari perikanan (pendapatan perikanan dan dana kompensasi pelestarian SDA kelautan).

c. Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang dipungut pemerintah umum melalui konsumen berkenaan dengan barang dan jasa yang diproduksi, dijual, dikirim, atau digunakan. Umumnya pajak tak langsung tersebut dibebankan pada biaya produksi dari barang dan jasa yang bersangkutan. Pajak tak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Pajak perdagangan internasional,
2. Pajak barang-barang produksi dalam negeri, dan
3. Pajak tak langsung lainnya.

Yang termasuk dalam pajak internasional adalah:

- a. Bea masuk
 - b. Pajak/pungutan ekspor
- Pajak barang-barang produksi dalam negeri terdiri dari :
1. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan (Ppn), yang terdiri dari: PPN barang-barang dalam negeri, PPN barang-barang impor, Ppn barang mewah (BM) dalam negeri, PpnBM luar negeri serta PPN dan PpnBM lainnya
 2. Cukai (tembakau, *ethyl* alkohol dan minuman mengandung alkohol lainnya

Sementara pajak tak langsung lainnya terdiri dari:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu masing-masing dari PBB Perkebunan, kehutanan dan pertambangan, setengah (50 persen) dari PBB Pedesaan, perkotaan dan PBB lainnya serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
- b. Bea Meterai
- c. Bunga tagihan PPN, PpnBM dan pajak tak langsung lainnya,
- d. Penjualan materai PT Pos Indonesia
- e. Pajak tak Langsung lainnya.

Untuk Pemerintah Daerah pajak tak langsung ini terdiri dari:

1. 50 persen dari pajak kendaraan

- bermotor,
- 2. Pajak radio,
- 3. Pajak perusahaan hasil hutan,
- 4. Pajak izin penangkapan ikan,
- 5. Pajak tontonan,
- 6. Pajak pembangunan I(pajak hotel dan restoran),
- 7. Pajak pemotongan hewan,
- 8. Pajak reklame,
- 9. Pajak minuman keras,
- 10. Pajak registrasi perusahaan,
- 11. Pungutan desa,
- 12. Pajak tak langsung daerah lainnya.

d. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pungutan pemerintah umum yang dikenakan dengan pendapatan bersih dari seseorang atau perusahaan seperti: pajak perseroan, yaitu pungutan pemerintah umum atas keuntungan perusahaan yang disetor ke kas negara secara teratur. Pajak langsung pemerintah pusat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1. Pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas) yang terdiri dari PPh minyak bumi dan PPh gas alam,
- 2. PPh non migas, yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22 (PPh pasal 22 non impor dan PPh pasal 22 impor),

PPh pasal 23, PPh pasal 25/29 (PPh pasal 25/29 pribadi, PPh pasal 25/29 badan, PPh pasal 26 dan PPh final dan fiskal luar negeri),

3. Pajak langsung lainnya yang terdiri dari:

- a. 50 persen dari PBB pedesaan, perkotaan dan PBB lainnya,
- b. 50 persen BPHTB,
- c. Bunga tagihan Pph.

Sedangkan pajak langsung pemerintah daerah dibedakan menurut kategori pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak pemerintah pusat yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah daerah.

Pajak ini terdiri dari:

- a. Pajak rumah tangga,
- b. Separuh pajak balik nama kendaraan bermotor,
- c. Setengah dari pajak kendaraan bermotor,
- d. 50% pajak bahan kendaraan bermotor
- e. Pajak perponding,
- f. Pajak bangsa asing,
- g. Opsen atas pajak kekayaan,
- h. Pajak anjing,
- i. Pajak jalan,
- J. Pajak hotel dan restoran (pajak pembangunan I),
- k. Pajak daerah lainnya.

e. Pungutan dan Denda

Nilai perincian **pungutan dan denda** ini adalah penerimaan pemerintah umum sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan/disediakan oleh pemerintah umum untuk kepentingan masyarakat.

Yang diklasifikasikan sebagai pungutan dan denda pemerintah pusat adalah pendapatan dari Jasa II, pendapatan kejaksaan dan peradilan, pendapatan dari bukan pajak luar negeri luar negeri (50%) dan seperlima dari penerimaan bukan pajak lainnya.

Pendapatan dari jasa II terdiri dari:

1. Penerimaan dari jasa lembaga keuangan (jasa giro dan rekening pemerintah),
2. Penerimaan iuran jasa penyelenggaraan lelang,
3. Penerimaan iuran lelang fakir,
4. Penerimaan jasa dalam urusan catatan sipil (nikah, talak, rujuk dan akte kelahiran),
5. Penerimaan dan pendapatan penagihan pajak,
6. Uang pewargaanegaraaan,
7. Pendapatan biaya lelang,
8. Pendapatan biaya penegihan piutang dan
9. Pendapatan jasa lainnya.

Pendapatan dari kejaksaan dan peradilan terdiri dari:

1. Uang legalisasi tanda tangan oleh menterikehakiman dan HAM,
2. Pengesahan uang di bawah tangan,
3. Uang meja (leges) dan upah pada panitera bidang usaha,
4. Hasil denda tilang,
5. Ongkos perkara,
6. Lain-lain penerimaan kejaksaan dan peradilan.

Sedangkan di pemerintah daerah merupakan bagian dari lain-lain pendatan daerah yang sah.

f. Sumbangan Kesejahteraan Pegawai Yang Tidak Didanakan

Yang dicakup dalam perincian ini adalah **sumbangan/kontribusi kesejahteraan pegawai** yang sebenarnya termasuk dalam upah dan gaji. Nilai ini merupakan kewajiban majikan (pemerintah umum) untuk membayar pegawainya, seperti pensiun, tunjangan kesejahteraan keluarga, uang pesangon dan kesejahteraan pegawai lainnya, yang pembayarannya tidak dilakukan melalui suatu dana khusus atau dananya diperkirakan sama dengan pengeluaran pemerintah umum untuk pensiun.

g. Transfer ke/dari Pemerintah Umum, Rumah Tangga dan Luar Negeri

Transfer yang dimaksud di sini adalah transaksi dana yang dilakukan oleh pemerintah umum, rumah tangga atau luar negeri. Dalam hal ini tidak ada barang atau jasa yang diterima sebagai imbalannya sehingga tidak ada kontribusi apapun dalam proses produksi.

Transfer dari sektor lainnya ke pemerintah pusat adalah :

1. Penerimaan kembali anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu,
2. Penerimaan kembali pembetulan pembukuan tahun anggaran yang lalu,
3. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu,
4. Penerimaan kembali piutang,
5. Seperlima dari penerimaan lain-lain pada PNBPN lainnya.

Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah berupa dana perimbangan yang terdiri dari:

1. 80% Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari DAU untuk propinsi dan DAU untuk Kabupaten/kota,

2. 80% Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK reboisasi dan non reboisasi.
3. 80% Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Penyesuaian.

h. Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran konsumsi pemerintah umum sama dengan produksi pemerintah umum yang dikonsumsi sendiri (perincian 3 pada neraca produksi) yaitu produksi bruto pemerintah umum dikurangi penerimaan dari produksi berupa barang dan jasa yang diberikan.

i. Pengeluaran Kekayaan

Termasuk dalam **pengeluaran kekayaan** ini, pembayaran bunga hutang luar negeri dan bunga hutang dalam negeri.

j. Subsidi

Dalam **subsidi** termasuk semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah umum pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk

barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Tujuan pemberian subsidi, antara lain, adalah menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi ini adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi non BBM (subsidi pangan, listrik, benih, obat, bunga kredit program, pupuk dan lain-lain).

k. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah umum kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah umum kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

l. Tabungan

Perincian **tabungan** ini merupakan faktor penyeimbang di dalam neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintah umum, yaitu selisih antara

jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.

2.6. Neraca Modal Pemerintahan Umum

Neraca modal pemerintahan umum adalah neraca yang memperlihatkan transaksi pemerintah umum dengan badan usaha lain atau dengan luar negeri. Transaksi yang dicatat di sini adalah transaksi yang menyangkut pembentukan modal saja. Pada sebelah kiri neraca tercantum nilai barang-barang modal pemerintah umum yang terdiri dari perubahan stok, PMTB, pembelian tanah, pembelian barang-barang modal yang tidak berwujud dan tranfer modal ke sektor lain atau ke luar negeri. Sebelah kanan neraca dicantumkan sumber dana yang dipakai untuk pembelian barang-barang modal di sebelah kiri tadi, antara lain berasal dari tabungan, nilai penyusutan barang modal, transfer dan pinjaman neto. Keterangan mengenai klasifikasi dan sumber data yang dicakup tiap-tiap perincian dalam neraca modal pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

a. Perubahan Stok

Stok terdiri dari bermacam-macam barang yang akan dipakai, yang sedang dalam proses pengerjaan dan barang-barang yang sudah jadi tapi belum dijual. Dengan demikian pemegang stok sebagian besar adalah perusahaan, termasuk perusahaan pemerintah umum dan pemerintah umum sendiri. Yang merupakan stok pemerintah umum adalah persediaan barang-barang strategis seperti bahan pangan. Nilai perubahan stok pada tahun tertentu adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Data **perubahan stok** barang-barang strategis pemerintah umum belum tersedia.

b. Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB adalah pengeluaran pemerintah umum untuk pengadaan barang modal dikurangi penjualan dari barang-barang modal bekas. Yang diklasifikasikan sebagai **barang modal** pemerintah umum adalah :

1. Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal,
2. Jalan, jembatan, dan konstruksi lainnya,
3. Mesin-mesin dan peralatan,

4. Kendaraan,
5. Perbaikan besar dan perluasan dari barang-barang modal yang telah disebutkan, dan
6. Pengeluaran dalam rangka perluasan areal pemukiman dan perkebunan serta pembelian ternak untuk dikembangbiakkan, kecuali ternak potong.

Data mengenai PMTB pemerintah umum diperoleh dari belanja modal pemerintah pusat dan daerah.

c. Pembelian Tanah

Pemerintah umum sering melakukan transaksi **jual beli tanah** baik jual beli antar instansi pemerintah umum maupun jual beli dengan swasta; misalnya, pemerintah umum memerlukan tanah untuk keperluan pangkalan militer, untuk daerah pemukiman, atau untuk pembangunan industri. Pengeluaran ini seharusnya dipisahkan dari PMTB karena menyangkut barang modal yang tidak dapat direproduksi. Akan tetapi karena datanya tergabung dengan belanja pembangunan lainnya, dan tidak dapat dipisahkan, maka dalam perhitungan, nilainya masih tergabung dalam PMTB. Apabila datanya

memungkinkan, maka transaksi yang akan dicatat di sini adalah transaksi neto (selisih pembelian dan penjualan).

d. Pembelian Barang Modal yang Tak Berwujud

Yang dimaksud dengan **pembelian barang modal yang tidak berwujud**, seperti hak perusahaan sumber alam, areal perikanan, konsesi, hak paten dan merk dagang. Transaksi yang dicatat adalah transaksi neto yaitu pembelian dikurangi penjualan. Akan tetapi, data mengenai pembelian dan penjualan barang modal tak berwujud ini tidak terpisah dari pengeluaran pembangunan lainnya sehingga di dalam neraca angkanya tergabung di dalam PMTB.

e. Transfer Modal yang Diterima dan yang Dikeluarkan

Transfer modal adalah transfer yang pelaksanaannya bisa sekaligus atau tidak beraturan, tetapi pada prinsipnya transfer modal tidak dipertimbangkan oleh pihak penerima sebagai menambah penerimaan *current*-nya serta tidak dipertimbangkan oleh pembayar sebagai mengurangi pendapatan *current*-nya.

Dalam praktik transfer bermacam-macam sifatnya, ada yang sebagai transfer modal dan ada juga transfer yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rutin, tergantung dari anggapan masing-masing pemberi dan penerima. Sebagai dasar penentuan adalah, apabila salah satu pihak memperlakukan transfer tersebut sebagai transfer modal, maka dalam klasifikasinya dimasukkan sebagai transfer modal. Transfer modal ini terjadi antara tingkat pemerintahan umum, pemerintah umum dengan luar negeri dan juga antara pemerintah umum dengan swasta.

Macam-macam transfer modal adalah sebagai berikut :

1. Transfer modal dari dalam negeri seperti PBB. Besarnya PBB yang dikeluarkan pemerintah pusat dianggap sama dengan jumlah PBB yang diterima pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Datanya diambil dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota kelompok penerimaan dan data dari Realisasi Penerimaan APBD propinsi dan kabupaten/kota direktorat Jenderal

Keuangan Daerah Departemen Keuangan.

2. Transfer modal dari luar negeri, yaitu berupa hibah. Datanya diperoleh dari pendapatan negara dan hibah berupa pendapatan hibah (dalam negeri dan luar negeri),
3. Transfer modal ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, adalah Dana Perimbangan untuk pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan desa, berupa dana bagi hasil yang terdiri dari:
 - a. Bagi hasil (perpajakan dan SDA untuk propinsi dan kabupaten/kota),
 - b. 20 % DAU dan DAK,
 - c. 20% DOK dan penyeimbang.

f. Tabungan

Tabungan adalah faktor penyeimbang pada neraca penerimaan dan pengeluaran, yang kemudian dipindahkan ke neraca modal sebagai sumber pembiayaan.

g. Penyusutan Barang Modal

Perincian **penyusutan barang modal** ini sama dengan perincian penyusutan dalam neraca produksi. Pada neraca

modal perincian ini menjadi salah satu sumber pembiayaan barang modal.

h. Pinjaman Neto

Perincian **pinjaman neto** ini adalah faktor penyeimbang dalam neraca modal pemerintah umum, yaitu selisih antara jumlah pembentukan modal dengan jumlah pembiayaan modal.

III. ANALISIS DESKRIPTIF BEBERAPA KOMPONEN NERACA PEMERINTAHAN UMUM 2001-2006

Seperti halnya sektor¹ lain, di sektor pemerintahan umum pun terdapat macam-macam neraca, yaitu neraca produksi, neraca penerimaan dan pengeluaran, dan neraca kapital. Masing-masing neraca tersebut mempunyai rinciannya sendiri-sendiri.

Berbagai macam analisis dapat dilakukan atas komponen-komponen neraca tersebut. Analisis *trend* dan analisis lain yang memerlukan data deret berkala akan dapat dilakukan apabila data tersedia dalam harga konstan. Neraca pemerintahan umum yang disajikan pada saat ini hanya meliputi transaksi-transaksi atas dasar harga yang berlaku saja. Oleh karena itu data jenis-jenis transaksi neraca-neraca ini akan dicoba dianalisis secara vertikal saja, yaitu analisis perbandingan relatif

antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam masing-masing neraca, kemudian dilihat perubahannya dari tahun ke tahun. Dengan demikian akan dapat dilihat perkembangan besaran-besaran transaksi dalam neraca-neraca tersebut dalam bentuk persentase dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, karena data yang disajikan adalah pada tahun-tahun tersebut. Dari rasio-rasio yang diperoleh antara komponen-komponen yang ada pada masing-masing neraca dari tahun ke tahun akan terlihat secara relatif bagaimana arah gerak atau fluktuasi berbagai perincian keuangan pemerintah, baik dalam hal pengeluaran maupun penerimaannya.

Di sini akan dilihat hasil perhitungan berbagai rasio yang diharapkan dapat merupakan indikator-indikator yang berguna, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Ada

¹ Dalam publikasi ini yang dimaksud dengan sektor adalah institusi bukan sektor ekonomi atau lapangan usaha

tujuh komponen dari neraca-neraca ini yang kelihatan penting untuk diamati gerakannya, yaitu **belanja barang, belanja pegawai, pengeluaran konsumsi, tabungan bruto** (tabungan+ penyusutan), **PMTB, subsidi** serta penerimaan dari **pajak**.

Di samping itu pada ketujuh komponen ini juga akan dilihat posisi dan perkembangannya di masing-masing tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa.

Tabel : 3.1 **Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Jumlah Penerimaan Pemerintah Umum**
Table : 3.1 Percentage of Items of General Government Account To The Total General Government Revenue

No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Belanja Barang / <i>Material Expenditure</i>	12,66	16,87	18,65	18,22	19,50	20,25	17,69
2	Belanja Pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	23,35	23,61	24,49	25,21	22,71	21,85	23,54
3	Pengeluaran Konsumsi / <i>Consumption Expenditure</i>	35,20	40,98	44,34	44,13	42,89	42,78	41,72
4	Tabungan Bruto / <i>Gross Savngs</i>	16,06	23,88	28,44	23,53	20,75	26,89	23,26
5	Subsidi / <i>Subsidies</i>	24,04	12,40	11,70	19,74	23,01	15,96	17,81
6	Pajak tak Langsung / <i>Indirect taxes</i>	28,77	34,47	34,80	34,19	33,25	30,53	33,06
7	Pajak Langsung / <i>Direct taxes</i>	32,87	34,07	34,49	34,53	37,04	65,18	67,28
8	Jumlah Penerimaan Pajak / <i>Total Tax Revenue</i>	61,65	68,54	69,29	68,72	70,30	65,18	97,28
9	Jumlah Penerimaan (milyar rupiah) / <i>Total Revenue (in billions rupiahs)</i>	322.159,57	322.623,10	369.165,57	432.897,18	524.524,94	673.326,22	-

*) Angka sementara/*preliminary figure*

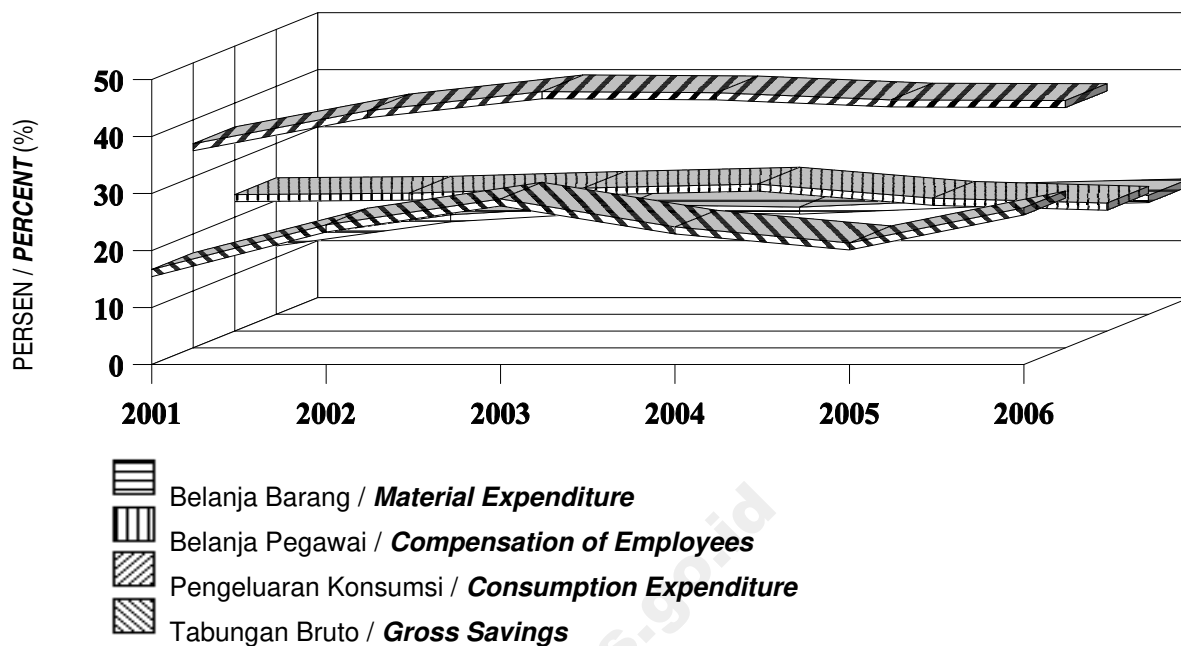
Catatan : Persentase terhadap total penerimaan pada neraca penerimaan dan pengeluaran (tabel 2.a)

Note : As percentage to total revenue of income and outlay accounts (see table 2.a)

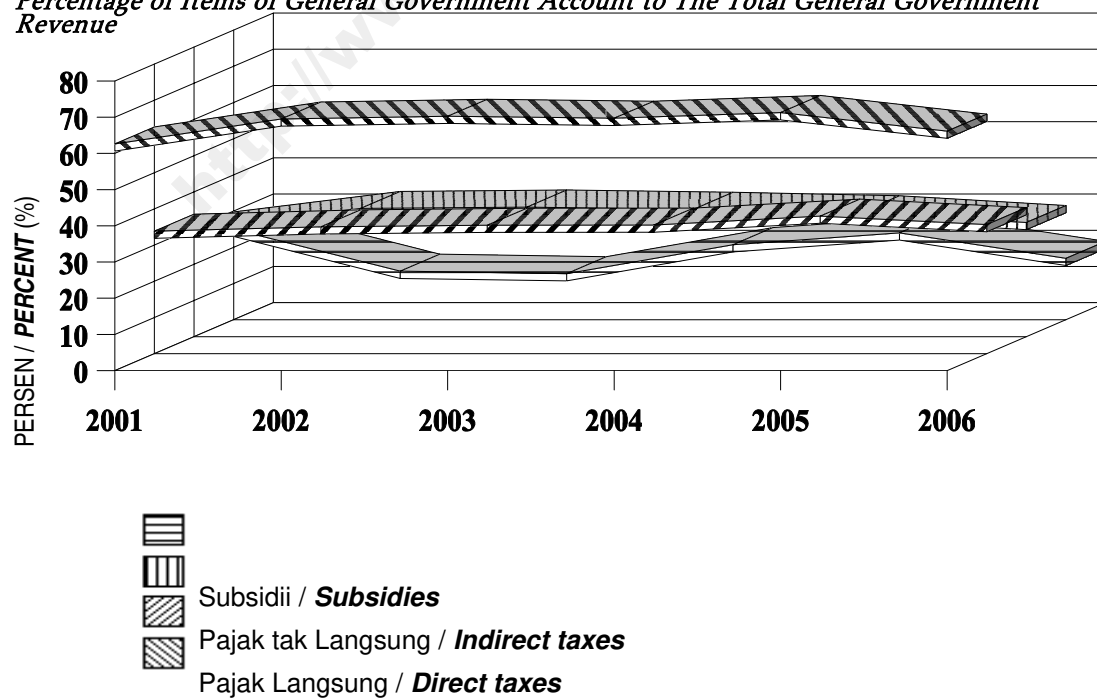
Dalam uraian berikut ini ketujuh komponen tersebut diamati dalam bentuk persentase terhadap

komponen-komponen neraca lain yang dirasa penting diperhatikan, serta posisi dan perkembangannya di masing-masing

Grafik : 3.1.a
 Graph : 3.1.a
 Umum
 Percentage of Items of General Government Account to The Total General Government Revenue



Grafik : 3.1.b
 Graph : 3.1.b
 Umum
 Percentage of Items of General Government Account to The Total General Government Revenue



Jumlah Penerimaan Pajak / Total Tax Revenue

3.1. Belanja Barang

Persentase belanja barang terhadap penerimaan pemerintah umum cenderung naik selama periode tahun 2001-2006, kecuali tahun 2004. Selama periode tersebut besarnya berkisar antara 13 persen sampai 32 persen. Persentase terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 12,66 persen dan tertinggi tahun 2006 sebesar 31,50 persen. Angka-angka yang terinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 serta grafiknya dapat dilihat pada Grafik 3.1.a. Secara rata-rata dari tahun 2001-2006 persentase belanja barang terhadap total penerimaan pemerintah umum adalah sebesar 20,25 persen.

Dari Tabel 3.4 terlihat proporsi belanja barang pemerintah umum menurut tingkat pemerintahan. Porsi belanja barang pemerintah pusat menunjukkan penurunan selama periode 2001-2004 tetapi naik pada tahun 2005-2006, yaitu dari 67,69 persen tahun 2001; kemudian turun 56,63 persen tahun 2002 dan 50,57 persen tahun 2003. Pada tahun 2004 naik kembali menjadi 53,88 persen dan tahun 2005 naik menjadi 61,35 persen dan naik lagi

menjadi 70,18 persen tahun 2006 dengan rata-rata sebesar 59,55 persen selama periode tersebut. Sebaliknya porsi belanja barang pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa bervariasi selama periode tersebut ada yang mengalami penurunan dan kenaikan, dengan rata-rata masing-masing sebesar 12,72; 26,45 dan 1,28 persen (lihat Grafik 3.4).

3.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai secara persentase mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penyerapan dana yang diperoleh pemerintah, karena secara rata-rata 26,36 persen selama tahun 2001-2006 dari penerimaan pemerintah dibelanjakan kembali untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil dan militer di pusat dan di daerah. Pada Tabel 3.1 dapat dilihat angka-angka persentase belanja pegawai terhadap penerimaan pemerintah umum, berturut-turut dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Interval yang terjadi adalah antara 23,35 - 33,98 persen. Perubahan-perubahan yang timbul yang skalanya dapat dilihat pada Grafik 3.1.a disebabkan antara lain oleh adanya

kebijaksanaan pemerintah dalam sistem penggajian pegawai negeri dan perubahan-perubahan penerimaan pemerintah umum dari tahun ke tahun.

Pada Tabel 3.2 dan Grafik 3.2 dapat pula dilihat perbandingan belanja pegawai pemerintah umum baik pegawai sipil maupun TNI/Polri terhadap PDB Indonesia. Angka rata-rata dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar 4,45 persen, yang tidak berbeda jauh dari nilai per tahunnya yang tidak kurang

dari 4 persen yaitu; 4,57 persen tahun 2001; 4,18 persen tahun 2002, 4,49 persen tahun 2003; 4,75 persen tahun 2004; 4,28 persen tahun 2005 dan 4,41 persen tahun 2006. Porsi belanja pegawai pemerintah umum menurut tingkat pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 3.5. Belanja pegawai pemerintah pusat porsinya menunjukkan penurunan tahun 2002 dan 2004. Begitu juga dengan pemerintah daerah propinsi dari tahun 2003 sampai dengan 2005 juga mengalami

Tabel 3.2 : *Percentage of Items of General Government Account To The Gross Domestic Product*

No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengeluaran Konsumsi / <i>Consumption Expenditure</i>	6,89	7,26	8,13	8,32	8,08	8,63	7,88
2	Belanja Pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	4,57	4,18	4,49	4,75	4,28	4,41	4,45
3	Subsidi / <i>Subsidies</i>	4,70	2,20	2,15	3,72	4,33	3,22	3,39
4	Tabungan Bruto / <i>Gross Savngs</i>	3,14	4,23	5,21	4,44	3,91	5,42	4,39
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3,26	3,40	4,10	3,33	3,24	3,41	3,46
6	PDB (milyar rupiah) / <i>GDP (in billions of rupiahs)</i>	1.646.322,00	1.821.833,40	2.013.674,60	2.295.826,20	2.784.960,40	3.338.195,70	-

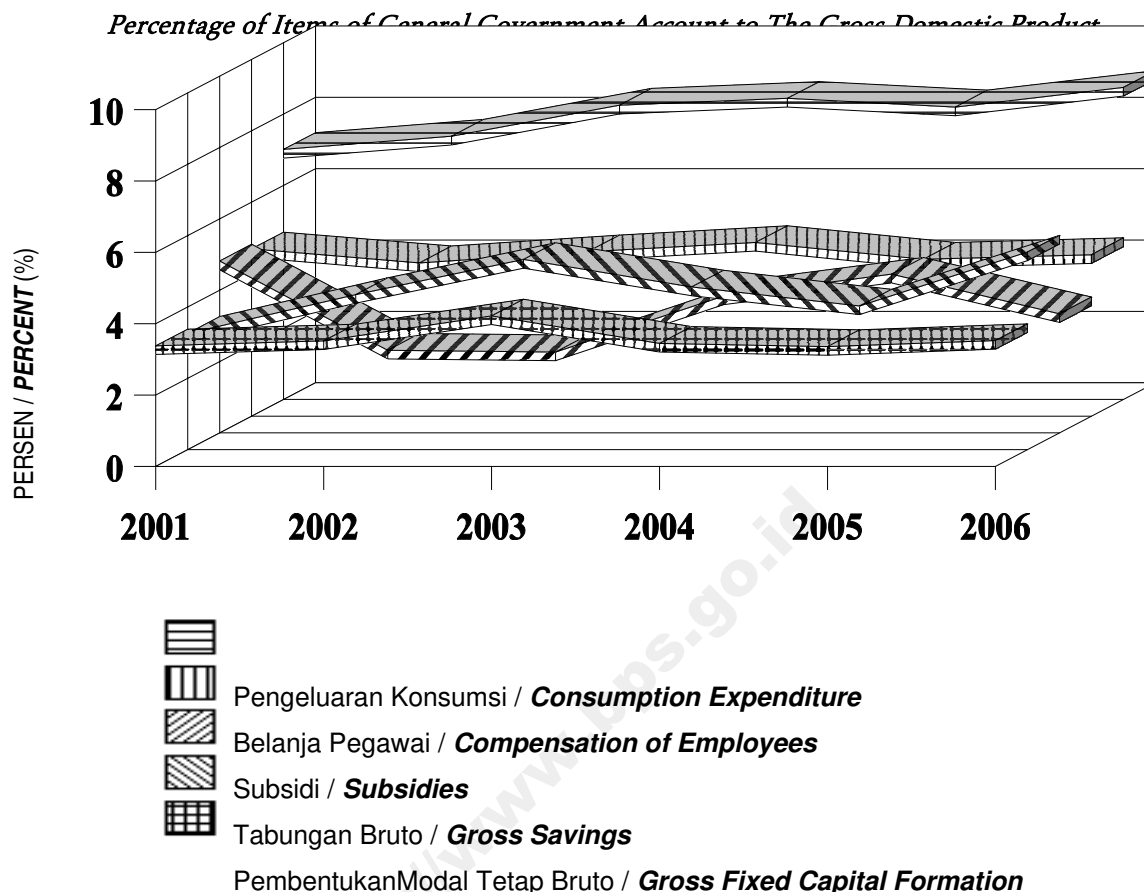
^{*)} Angka sementara/*preliminary figure*

Grafik

Persentase Komponen-Komponen Neraca Pemerintahan Umum Terhadap Produk Domestik Bruto

: 3.2

Grapp
h



penurunan. Sebaliknya pada pemerintah daerah kabupaten / kota dan desa mengalami kenaikan dari tahun 2000-2005 kecuali pada tahun 2003 dan 2006 dengan rata-rata masing-masing sebesar 54,93; 10,74; 32,31 dan 2,01 persen (lihat Grafik 3.5).

3.3. Pengeluaran Konsumsi

Karena bagian terbesar dari

pengeluaran konsumsi pemerintah umum terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, maka fluktuasi rasionya akan mengikuti fluktuasi yang terjadi pada kedua belanja tersebut.

Persentase pengeluaran konsumsi pemerintah umum terhadap total penerimaan pemerintah umum secara berturut-turut dari tahun 2001-2006 adalah sebesar 35,20 persen, 40,98

persen, 44,34 persen 44,13 persen,
51,97 persen dan 66,55 persen seperti

<http://www.bps.go.id>

erlihat pada tabel 3.1. Dalam periode 2001 sampai dengan 2006 rata-rata 47,20 persen dari penerimaan pemerintah umum digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi.

Dalam Grafik 3.1.a. terlihat bahwa persentase pengeluaran konsumsi pemerintah umum berkorelasi dengan persentase belanja pegawai pemerintah umum.

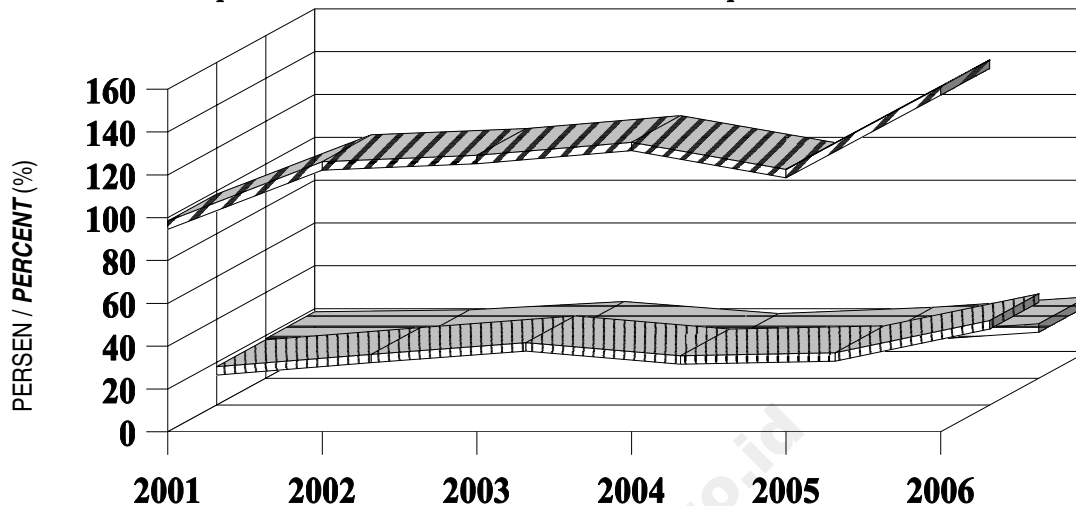
Tabel 3.3
Persentase Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional

Table		Percentage of General Government Gross Saving and General Government Gross Fixed Capital Formation To Total Gross Fixed Capital Formation						
No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional / General Government Gross Fixed Capital Formation in Total Gross Fixed Capital Formation	16,55	17,52	21,38	15,81	18,66	23,52	18,91
2	Tabungan Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional / General Government Gross Savings in Total Gross Fixed Capital Formation	15,98	21,76	27,18	21,07	22,51	37,46	24,33
3	Tabungan Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum / General Government Gross Savings in General Government Gross Fixed Capital Formation	96,54	124,25	127,17	133,26	120,62	159,23	126,84
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional (milyar rupiah) / Total Gross Fixed Capital Formation (in billions of rupiahs)	323,875,30	353,967,00	392,788,60	515,381,20	657,625,10	800,083,50	-
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum (milyar rupiah) / General Government Gross Fixed Capital Formation (in billions of rupiahs)	53.594,07	61.995,60	82.561,64	76.436,72	90.212,88	113.721,05	-

^{*)} Angka sementara preliminary figure

Grafik : 3.3
 Persentase Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional

Graph
Percentage of Gross Saving and General Government Gross Fixed Capital Formation to Total Gross Fixed Capital Formation



Horizontal lines: Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional/
General Government Gross Fixed Capital Formation in Total Gross Fixed Capital Formation

Vertical lines: Tabungan Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional/
General Government Gross Savings in Total Gross Fixed Capital Formation

Diagonal lines: Tabungan Bruto Pemerintah Umum Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum /
General Government Gross Savings in General Government Gross Fixed Capital Formation

Apabila pengeluaran konsumsi pemerintah umum dibandingkan terhadap PDB Indonesia, maka terlihat bahwa peranan pemerintah umum dalam penggunaan PDB atas dasar harga berlaku rata-rata selama tahun 2001-2006 adalah sebesar 7,88 persen (Tabel 3.2). Dari tahun 2001-2006 peranannya terlihat semakin naik, kecuali tahun 2005. sebesar 8,08 persen dan berfluktuasi tidak kurang dari 6-9

persen, yaitu sebesar 6,89 persen tahun 2001 terus menjadi 7,26; 8,13; 8,32 persen tahun 2002-2004, Kemudian turun menjadi 8,08 persen tahun 2005 dan naik lagi menjadi 8,63 persen tahun 2006.

Pada Tabel 3.6 dan Grafik 3.6, disajikan peranan pengeluaran konsumsi pemerintah umum menurut tingkat pemerintahan. Di sini terlihat

peranan pemerintah pusat tidak kurang dari 50 persen, dengan rata-rata sebesar 56,85 persen, selama tahun 2001-2006. Kemudian peranannya diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 29,72 persen, pemerintah daerah propinsi 11,67 persen, dan yang paling kecil peranannya adalah pemerintah desa yaitu sebesar 1,76 persen, atau kurang dari dua persen per tahunnya.

3.4. Tabungan Bruto

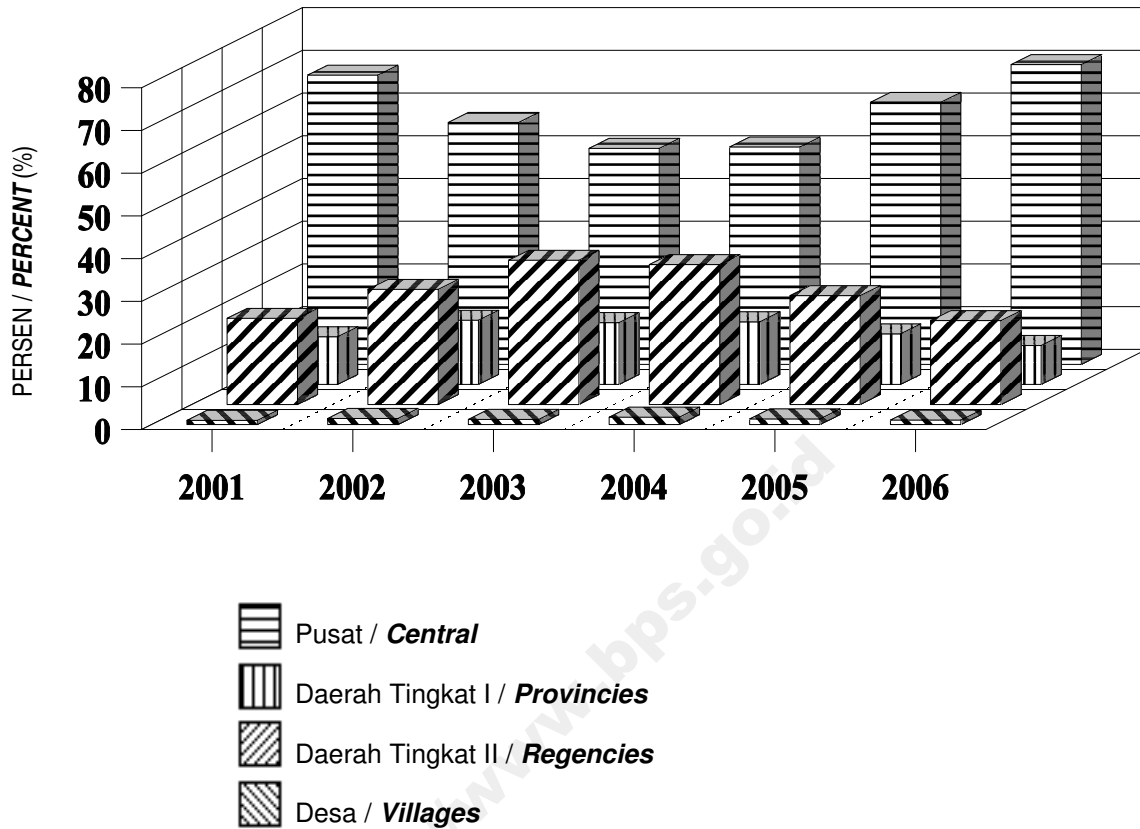
Nilai tabungan bruto (tabungan+ penyusutan) pemerintah umum yang diperoleh dari neraca produksi serta neraca penerimaan dan pengeluaran pemerintah umum apabila dibandingkan dengan total penerimaan pemerintah umum cukup bervariasi selama tahun 2001-2006, dengan rata-rata sebesar 26,48 persen. Persentase terbesar terjadi pada tahun 2006 dan terkecil pada

Tabel : 3.4 Proporsi Belanja Barang Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan
 Table : 3.4 *Proportion of General Government Material Expenditure By Level of Government*

No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemerintah Umum / <i>General Government</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat / <i>Central Government</i>	67,69	56,63	50,57	50,88	61,35	70,18	59,55
3	Pemerintah Daerah Tingkat I / <i>Provincies</i>	11,17	15,01	14,48	14,66	11,85	9,14	12,72
4	Pemerintah Daerah Tingkat II / <i>Regencies</i>	20,17	26,94	33,75	32,74	25,47	19,64	26,45
5	Pemerintah Desa / <i>Villages</i>	0,97	1,42	1,20	1,72	1,34	1,03	1,28
6	Jumlah Belanja Barang (milyar rupiah) / <i>Total Material Expenditure (in billions of rupiahs)</i>	40.800,60	54.432,46	68.840,83	78.862,86	102.279,12	136.342,13	-

*) Angka sementara/*preliminary figure*

Grapp : 3.4 *Proportion of General Government Material Expenditure By Level of Government*



tahun 2001. Nampaknya ada tendensi menurun dari tahun 2004-2005, setelah itu naik lagi pada tahun 2006. Persentasenya berturut-turut sebagai berikut: tahun 2001 sebesar 16,06 persen, kemudian naik menjadi 23,88 dan 28,44 persen tahun 2002 dan 2003. Setelah itu kembali mengalami penurunan tahun 2004 menjadi 23,53 persen dan naik kembali menjadi 25,14 dan 41,83 persen masing-masing tahun

2005 dan 2006 (lihat Tabel 3.1).

Dari Tabel 3.2 dapat juga dilihat peranan tabungan bruto pemerintah umum di dalam PDB Indonesia. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 rata-ratanya adalah sebesar 4,39 persen. Pada tahun 2001 merupakan persentase terkecil sebesar 3,14 persen dan tahun 2006 merupakan persentase terbesar yaitu 5,42 persen.

Apabila dilihat peranan tabungan bruto pemerintah umum ini sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam total PMTB nasional maka akan kelihatan bahwa peranan pemerintah umum cukup besar yaitu rata-rata sebesar 24,33 persen selama tahun 2001-2006. Persentase yang terendah adalah 15,98 persen pada tahun 2001 dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 37,46 persen. Angka yang lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Grafik 3.3. Dari tabel tersebut tampak bahwa sejak tahun 2001-2006 lebih dari 15 persen PMTB nasional dibiayai dari tabungan bruto pemerintah umum.

Peranan tabungan bruto pemerintah umum sendiri terhadap PMTB pemerintah umum mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif yaitu berturut-turut tahun 2001 sebesar 96,54 persen dan naik kembali dari tahun 2002 - 2004 menjadi 124,25; 127,17 dan 133,26 persen. Kemudian turun menjadi 120,62 persen tahun 2005 dan naik lagi menjadi 159,23 persen tahun 2006. Rata-rata selama tahun 2001-2006 adalah sebesar 126,84 persen (lihat Tabel 3.3 dan Grafik 3.3).

Tabel 3.7 memuat proporsi tabungan bruto pemerintah umum menurut tingkat pemerintahan. Porsi tabungan bruto pemerintah pusat merupakan porsi terbesar dengan rata-rata sebesar 83,16 persen selama tahun 2000-2005. Kemudian tabungan bruto pemerintah daerah propinsi dengan rata-rata sebesar 4,18 persen, tabungan bruto pemerintah kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 11,51 persen dan pemerintah desa dengan rata-rata sebesar 1,15 persen (lihat Grafik 3.7.).

3.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Dalam PMTB nasional terlihat peranan pemerintah umum semakin berkurang. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.3, yang menyajikan rasio antara PMTB pemerintah umum dengan PMTB nasional. Rata-rata selama tahun 2001-2006 adalah sebesar 18,91 persen. Besarnya persentase ini mencerminkan hasil yang dicapai pemerintah umum dalam program pembangunan nasional.

Kalau diteliti peranan PMTB pemerintah umum dalam PDB menurut penggunaan (Tabel 3.2 dan Grafik 3.2), terlihat bahwa pemerintah umum

Tabel : 3.5 **Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan**
Table **Proportion of General Government Compensation of Employees By Level of Government**

No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemerintah Umum / General Government	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat / Central Government	57,58	56,78	61,36	57,69	46,66	49,53	54,93
3	Pemerintah Daerah Tingkat I / Provincies	12,55	12,60	11,03	10,04	9,37	8,86	10,74
4	Pemerintah Daerah Tingkat II / Regencies	27,84	28,36	25,71	30,66	41,78	39,52	32,31
5	Pemerintah Desa / Villages	2,04	2,25	1,90	1,61	2,20	2,08	2,01
6	Jumlah Belanja Pegawai (milyar rupiah) / Total Compensation of Employees (in billions of rupiahs)	75.236,51	76.182,63	90.416,35	109.112,22	119.145,55	147.119,17	-

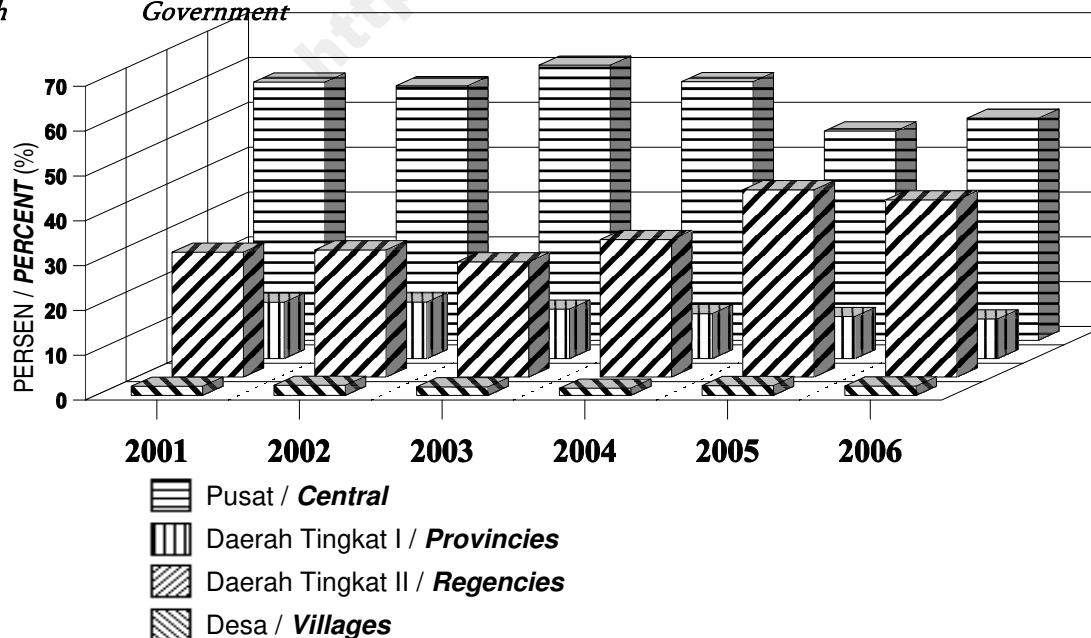
^{*)} Angka sementara/preliminary figure

Tabel : 3.5 **Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan**
Table : 3.5 Proportion of General Government Compensation of Employees By Level of Government

No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemerintah Umum / General Government	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat / Central Government	57,58	56,78	61,36	57,69	46,66	49,53	54,93
3	Pemerintah Daerah Tingkat I / Provinces	12,55	12,60	11,03	10,04	9,37	8,86	10,74
4	Pemerintah Daerah Tingkat II / Regencies	27,84	28,36	25,71	30,66	41,78	39,52	32,31
5	Pemerintah Desa / Villages	2,04	2,25	1,90	1,61	2,20	2,08	2,01
6	Jumlah Belanja Pegawai (milyar rupiah) / Total Compensation of Employees (in billions of rupiahs)	75.236,51	76.182,63	90.416,35	109.112,22	119.145,55	147.119,17	-

^{*)} Angka sementara/preliminary figure

Grafik : 3.5 **Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan**
Graph : 3.5 Proportion of General Government Compensation of Employees By Level of Government



Kalau diteliti peranan PMTB pemerintah umum dalam PDB menurut penggunaan (Tabel 3.2 dan Grafik 3.2), terlihat

bahwa pemerintah umum peranannya semakin berkurang. Dari tahun ke tahun persentasenya tidak lebih dari 3 persen. Rata-rata persentase PMTB pemerintah umum terhadap PDB selama tahun 2001-2006 adalah sebesar 3,46 persen.

Peranan PMTB pemerintah umum menurut tingkat pemerintahan menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dominan (lihat Tabel 3.8 dan Grafik 3.8). Secara rata-rata peranan pemerintah pusat

sebesar 50,71 persen selama tahun 2001-2006. Peranan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa berturut-turut secara rata-rata selama tahun 2001-2006 adalah sebesar 15,72; 31,18 dan 2,39 persen.

3.6. Subsidi

Persentase subsidi terhadap total penerimaan pemerintah umum cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun.

dalam PMTB pemerintah umum adalah

Berfluktuasinya subsidi ini tentu

Tabel 3.6 Table : 3.6 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan <i>Proportion of General Government Consumption Expenditure By Level of Government</i>								
No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006 [*]	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemerintah Umum / <i>General Government</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat / <i>Central Government</i>	60,60	57,28	57,74	55,30	51,92	58,27	56,85
3	Pemerintah Daerah Tingkat I / <i>Provincies</i>	11,94	13,30	12,13	11,75	11,28	9,61	11,67
4	Pemerintah Daerah Tingkat II / <i>Regencies</i>	25,68	27,48	28,52	31,27	34,91	30,47	29,72
5	Pemerintah Desa / <i>Villages</i>	1,77	1,95	1,61	1,68	1,89	1,64	1,76

Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2001-2006

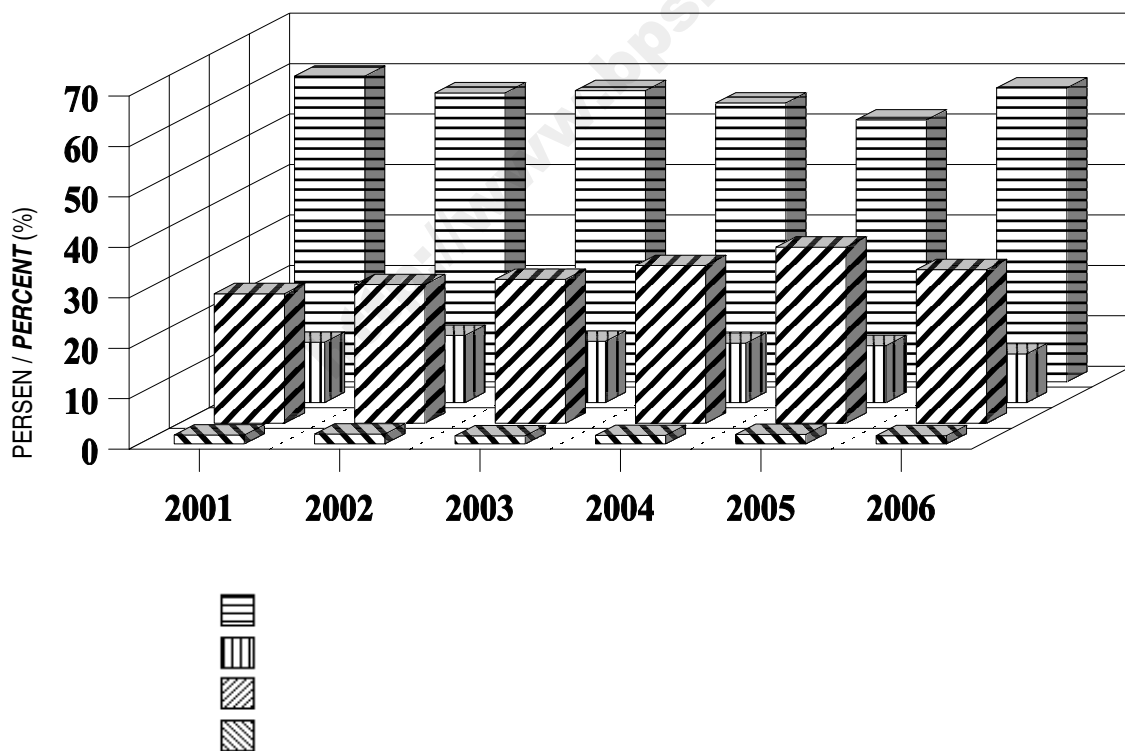
6 Jumlah Pengeluaran Konsumsi (milyar rupiah) / <i>Total Consumption Expenditure (in billions of rupiahs)</i>	113.416,08	132.218,68	163.701,24	191.055,63	224.980,54	288.079,87	-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

**) Angka sementara/preliminary figure*

berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah dan situasi perekonomian secara umum. Antara tahun 2001-2006 rata-rata persentase subsidi terhadap total penerimaan pemerintah dan umum adalah sebesar 20,10 persen. Persentase subsidi terhadap total penerimaan pemerintah umum yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2001, 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 24,04; 27,88 dan

24,82 persen, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2003, yaitu sebesar 11,70 persen. Tingginya subsidi pemerintahan umum pada tahun 2001, 2005 dan 2006 antara lain disebabkan oleh besarnya subsidi BBM dan harga pada tahun-tahun tersebut. Pada tabel 3.1 dan grafik 3.1.b dapat dilihat persentasenya dari tahun 2001 sampai tahun 2006.

Di sini akan dibangun GRAFIK 3.6



Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2001-2006

Grafik

Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan

: 3.6

Grafik

Proportion of General Government Consumption Expenditure By Level of Government

Rasio subsidi terhadap PDB Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2006 secara umum tidak besar kecuali tahun 2001 sebesar 4,70 persen dengan rata-rata sebesar 3,39 persen (lihat Tabel 3.2 dan Grafik 3.2).

3.7. Pajak

Pajak menjadi salah satu sumber utama dalam penerimaan pemerintah umum. Dari tahun ke tahun terlihat persentase yang cukup tinggi dan relatif stabil kecuali tahun 2001 terjadi sedikit

penurunan, karena turunnya penerimaan dari pajak langsung. Antara tahun 2001-2006 rata-rata penerimaan pajak terhadap total penerimaan pemerintah umum adalah sebesar 67,28 persen, dengan rincian 33,99 persen berasal dari pajak langsung dan 33,06 persen berasal dari pajak tidak langsung. Cukup besarnya porsi pajak langsung ini adalah karena di dalamnya termasuk pajak perseroan minyak yang merupakan sumber terbesar dari penerimaan pemerintah umum.

Tabel 3.7 Proporsi Tabungan Bruto Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan
Table 3.7 Proportion of General Government Gross Savings By Level of Government

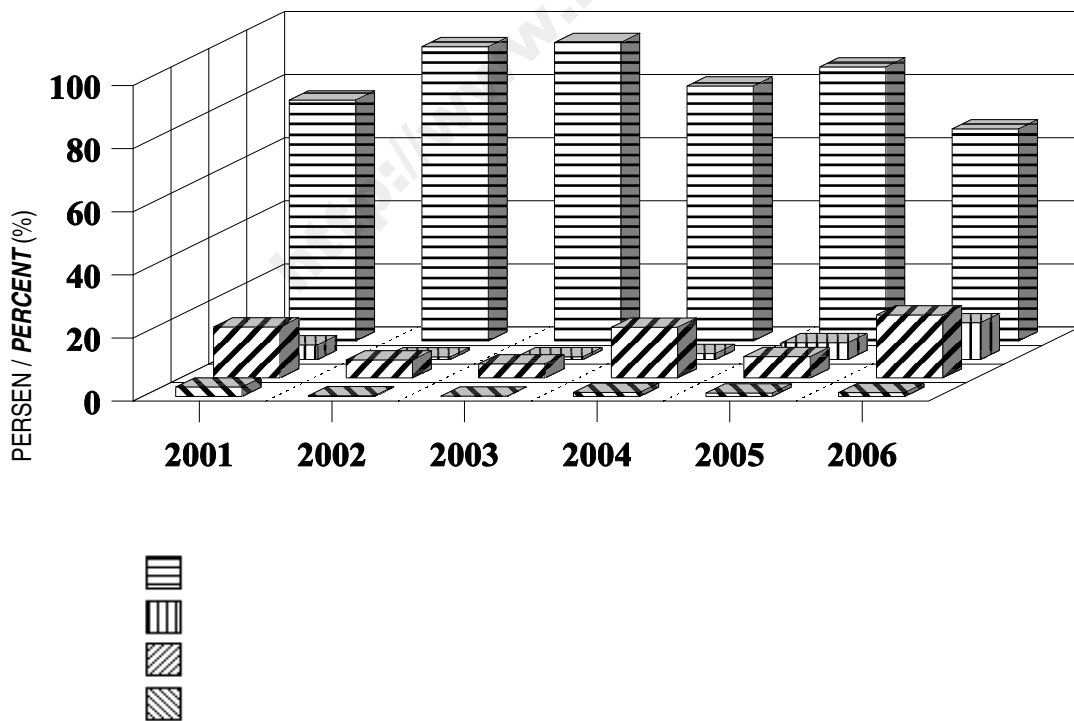
No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006 [*]	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemerintah Umum / General Government	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat / Central Government	76,30	93,25	94,57	80,80	86,83	67,19	83,16
3	Pemerintah Daerah Tingkat I / Provincies	4,59	0,82	0,86	1,89	5,31	11,63	4,18
4	Pemerintah Daerah Tingkat II / Regencies	16,13	5,70	4,47	16,03	6,77	19,95	11,51
5	Pemerintah Desa / Villages	2,99	0,23	0,10	1,28	1,09	1,23	1,15

6	Jumlah Tabungan Bruto (milyar rupiah) / Total Gross Savings (in billions of rupiahs)	51.740,79	77.029,73	104.992,12	101.856,45	108.812,95	181.081,86	-
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	---

**) Angka sementara/preliminary figure*

Persentase tertinggi penerimaan pemerintah umum dari pajak adalah sebesar 70,30 persen pada tahun 2005; di mana 37,04 persen diantaranya berasal dari pajak langsung dan 33,25 persen merupakan pajak tidak langsung. Persentase paling rendah adalah sebesar 61,65 persen pada tahun 2001; di mana 32,87 persen berasal dari pajak langsung, dan 28,77 persen merupakan pajak tidak langsung

Kalau dibandingkan persentase tertinggi dengan persentase terendah, bedanya sebesar 9,45 persen, yang menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak terhadap total penerimaan pemerintah umum relatif stabil kecuali tahun 2001. Persentase dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 untuk pajak ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Grafik 3.1.b. Proporsi penerimaan pajak pemerintah pusat merupakan porsi terbesar dari



Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2001-2006

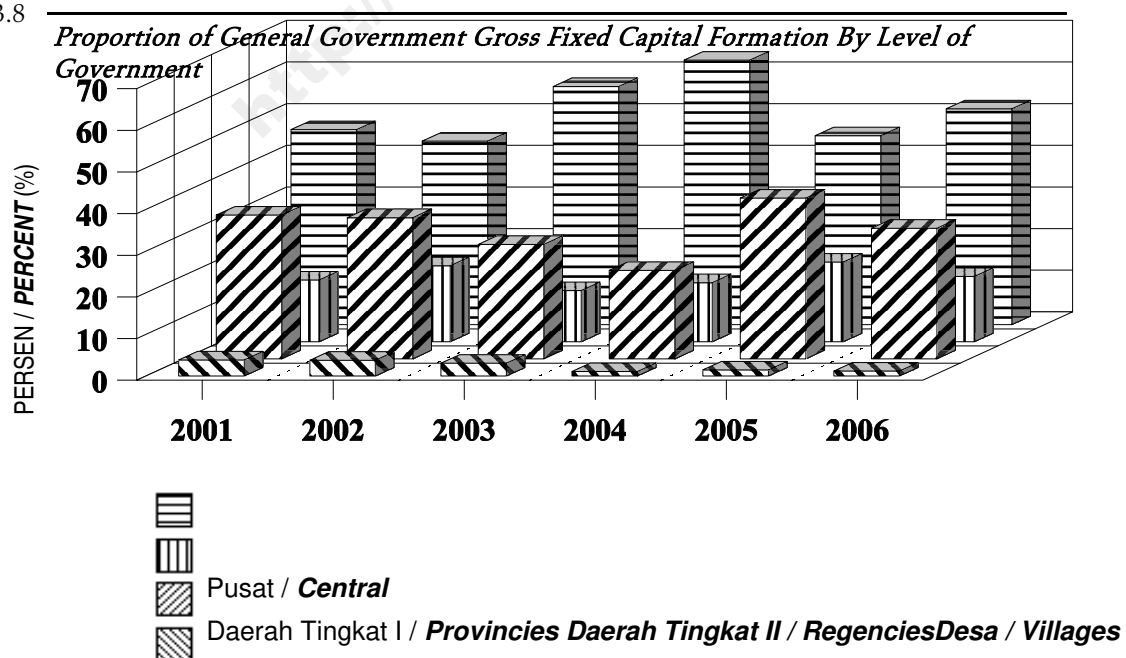
Grafik : 3.7
Proporsi Tabungan Bruto Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan
Proportion of General Government Gross Savings By Level of Government

Tabel : 3.8 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan
 Table : 3.8 Proportion of General Government Gross Fixed Capital Formation By Level of Government

No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemerintah Umum / General Government	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat / Central Government	46,82	44,07	57,18	63,51	40,85	51,82	50,71
3	Pemerintah Daerah Tingkat I / Provinces	14,82	18,25	12,28	14,19	19,13	15,67	15,72
4	Pemerintah Daerah Tingkat II / Regencies	34,52	33,91	27,48	21,24	38,59	31,34	31,18
5	Pemerintah Desa / Villages	3,84	3,77	3,05	1,06	1,43	1,17	2,39
6	Jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (milyar rupiah) / Total Gross Fixed Capital Formation (in billions of rupiahs)	53.594,07	61.995,60	82.561,64	76.436,72	90.212,88	113.721,05	-

^{*)} Angka sementara/preliminary figure

Grafik : 3.8 Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan
 Graph : 3.8 Proportion of General Government Gross Fixed Capital Formation By Level of Government



penerimaan pajak pemerintah, yaitu rata-rata sebesar 93,97 persen selama tahun 2001-2006 (lihat Tabel 3.9 dan Grafik 3.9). Rata-rata penerimaan pajak pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan desa masing-masing sebesar 4,53; 1,32 dan 0,18 persen.

Dari grafik-grafik yang ada dapat dilihat bahwa di antara tujuh variabel yang disajikan persentasenya tidak menunjukkan gejala naik turun yang searah. Tabungan bruto misalnya, agak berfluktuasi dan penerimaan dari pajak relatif stabil. Oleh karena itu bila ditinjau dari segi persentase saja maka dapat disimpulkan bahwa tidak terlihat suatu pola hubungan yang jelas di antara variabel-variabel yang disajikan persentasenya tersebut. Namun ada dua pasang variabel yang menunjukkan pola naik turun yang searah. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi dan belanja pegawai. Keduanya bergerak searah, sehingga dapat diduga bahwa suatu variabel lain mengontrol keduanya. Pasangan kedua yang mungkin mempunyai korelasi tinggi adalah pasangan antara PMTB dengan tabungan bruto. Keduanya naik dan turun bersama-sama walaupun

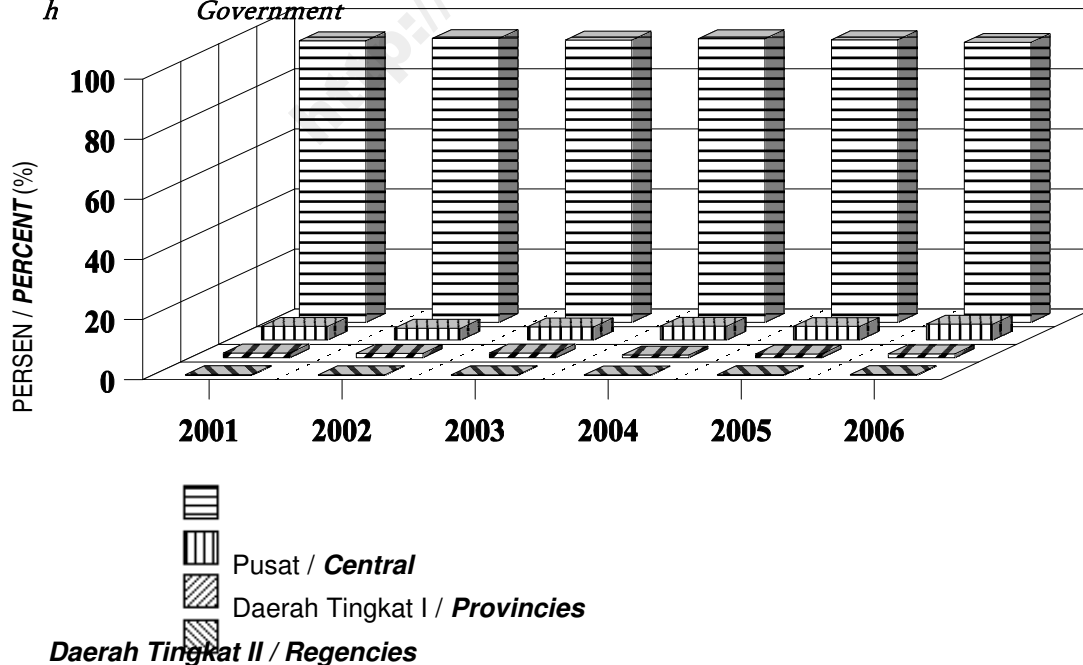
perbedaan arah dan kemiringan lereng grafik terjadi di sana-sini. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi makro karena salah satu sumber pembiayaan PMTB yang terbesar adalah tabungan bruto.

Tabel : 3.9 Proporsi Penerimaan Pajak Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan Biaya
 Table : 3.9 Proportion of General Government Total Tax Revenue Level of Government

No	Keterangan / Items	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)	Rata-rata / Average
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pemerintah Umum / General Government	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pemerintah Pusat / Central Government	93,71	94,49	93,93	94,42	94,06	93,20	93,97
3	Pemerintah Daerah Tingkat I / Provinces	4,52	3,90	4,37	4,59	4,50	5,29	4,53
4	Pemerintah Daerah Tingkat II / Regencies	1,55	1,45	1,54	0,86	1,24	1,27	1,32
5	Pemerintah Desa / Villages	0,21	0,16	0,16	0,13	0,19	0,23	0,18
6	Jumlah Penerimaan Pajak (milyar rupiah) / Total Tax Revenue (in billions of rupiahs)	198.596,80	221.124,55	255.796,79	297.481,22	368.726,23	438.901,19	-

*) Angka sementara/preliminary figure

Grafik : 3.9 Proporsi Penerimaan Pajak Pemerintah Umum Menurut Tingkat Pemerintahan
 Graph : 3.9 Proportion of General Government Total Tax Revenue By Level of Government





I. INTRODUCTION

General government sector in Indonesia consists of central and local government. Central government covers all governmental institutions, either those located in the capital city or their vertical units all over the country. On the other hand, local governments comprise all units of local government (provincial), local government (regencial) and village government. Policies and implementations of development at any level of government make an integral system of the whole national development.

Until present time policies in public finance, as it can be seen in central government budget (APBN) and local government budget (APBD), are based on balanced and dynamic budgeting principle with the increasing in government saving as the objective. Government saving is the excess of domestic revenue over routine expenditure. Compensation of government employees, which includes wages and salaries of central and local government employees, is one of the expenses funded

by government saving. Increasing on compensation of central government employees is purposed to improve the level of quality and welfare of government employees. Besides that, it is also meant to motivate the efficiency of the national economic development.

Various aids and assistance carried on by central government to the local central governments are the reflections of central government political will to motivate local governments to improve their capabilities in governmental tasks, public service and regional development on each field assigned. Policies on financial aids were planned to support and also to establish a good financial linkage between central and local government which is basically required to maintain dynamic and established balance in inter-regional development. One main effort to mobilize regional development fund is by increasing its own regional revenues. Those revenues comprise regional self-attained revenues and land tax, either on provincial or

regional level. The result is the reduction of central government aids to local governments at both levels gradually.

The government of a nation is simultaneously a large consumer as well as a large producer. Usually the financial policy-making of the nation also lies in its hands. For these reasons, government decisions on those three broad categories of activities will substantially affect the activities of other economic sectors.

As mentioned in GBHN that one of the characteristics of the so-called economic democracy adopted by Indonesia is that the government plays an important role in overall economic affairs. This means that successful economic management by the government will affect favorably the Indonesian people.

The successful economic achievement, basically is the result of careful and intelligent planning, which is based on complete and reliable data. Therefore, complete, reliable and continuous data on the economic performance of the government, including statistics on government economic performance compiled in a standard set of accounts are

needed.

This publication is particularly designed for the presentation of general government accounts. Part I explains the concepts and definitions used and presenting the tables of the three accounts, i.e. production account, income and outlay account, and capital account of the general government covering the period of 2001 through 2006. Part II contains a descriptive analysis of the accounts presented in part I.

The concepts, definitions, and classifications used are those already standardized by the United Nations in "Draft Manual on Public Sector Statistics.", published on February 1979.

II. CONCEPTS AND DEFINITIONS

In many countries, governments at various levels have important role in the economic and social affairs of their society. It is necessary, therefore, that decision makers, legislators, researchers, journalists, commentators, ordinary citizens etc to be informed about the stage and direction of development of the government sector. One of the statistics at macro-level closely associated with the measurement of government activities is the system of Public Sector Accounts, a subset of the National Accounting System.

From the activities view-point, the public sector is classified into two groups, i.e., general government and public enterprises. According to the UN definitions, the government services essentially consist of governmental departments, ministries, offices and other bodies engaged in public administration and defence, the operation of social security schemes and

the provision of community, social and economic services which are free of charge or at prices that do not cover their cost of production.¹

Also included are :

- a. Non-profit institutions that are mainly financed on a regular basis by the government, such as public schools and universities, hospitals, museums, libraries, and art galleries,
- b. Public bodies that produce goods and non-financial services of a kind often provided by business enterprises, but the production activities are so integrated with those of their parent body that their production accounts cannot be isolated. Examples include publication units in governmental offices which sell books, small public units selling postcards and art reproductions in museums, public

¹ United Nations, *Draft Manual on Public Sector Statistics*, United Nations, February 1979.

experimental units selling seeds, etc. However, these transaction activities are only incidental activities of the bodies which these units are affiliated.

- b. Public bodies that provide financial*
- c. services but have no authority to engage in financial transactions.*

The United Nations recommends that all transactions made by government be compiled in the form of accounts consisting of production account, income and outlay account, and capital transaction account.²

The general government production account is defined as an account that contains transactions of general government production activities. The right-hand side of the account covers income categories such as production for own consumption, receipts from commodities produced and receipts from services rendered. The total output of the sector is the sum of those three income categories. The expenditure categories recorded on the left-hand side of the account consists of are expenditure on goods, wages and

²*Ibid*

salaries, capital consumption allowance, and net indirect taxes, which make up the total input of this sector. The item of production for own consumption is used as a balancing item for this account.³

The income and outlay account of general government covers all transactions, except those concerning capital items made by the general government. On the right-hand side of the account the categories covered are net profit, property incomes, direct taxes, indirect taxes, and other receipts of the general government. The left-hand side of the account contains general government expenditure categories which consist of consumption expenditures, rental payments, subsidies, social grants and general government aid in the form of liquid assets. The balancing item of the account is the general government savings.

The capital transaction account of general government records capital transactions and their finance, between the government and other sector

³*In the compilation of account at macro-level there is always an items which functions to balance the left-hand and the right-hand totals.*

including the rest of the world. The values of general government capital which consist of inventory changes, gross fixed capital formation (GFCF), net purchase of land, net purchase of intangible goods, and capital transfer to other sectors or to the rest of the world appear on the left-hand side of the account. While the right-hand side of the account comprises categories of sources of finance for capital goods such as savings, capital consumption allowances, transfers, and net borrowing functioning as the balancing item.

The need to compile the three accounts arises because the relationship between production, consumption, and investment often constitutes a major ingredient in many macro-economic analysis.

As mentioned before, since an item may appear in more than one account the three accounts make an integral sub-system of the whole system of accounts. To shows the relationship between the three accounts of general government, a simple example is presented in the diagram below. (see Table 2.1 up to Table 2.3)

The item production for own consumption (category 3 of the production account), for example, is the balancing item in the production account, that same category reappears as item 5, consumption expenditure, on the left-hand side of the income and outlay account. Similarly, the item of capital consumption allowance which appears as item 2 on the left-hand side of the production account, reappears in the capital transaction account as one of the sources for finance of capital formation (item 11). Savings (item 6), in the income and outlay account, is the balancing item in the account but reappears on the right-hand side of the capital transaction account as one of the sources for financing capital formation (item 12). The transactions included in the accounts are those occur within a certain reference period, usually a year or a quarter.

In compiling the general government account for Indonesia, the general government sector is divided into two, namely central government and local government. Central government covers all government bodies affiliated to

central government, including all their vertical regional branches, the local governments are provincial government, regency government, and village government.

The government sector is meant to produce principally public services which are difficult to measure by any economic yardstick such as to carry out governmental administration, to maintain the stability of the nation, to improve the education and health of the society, to formulate national economic policy, and the like. It is clear, therefore that government activities are distinct from other economic activities both with respect to input structure and source of funds. Because the values of government output are often difficult to measure, these outputs are assumed equal to the value of inputs used to produce them. The major better part of government output is consumed by the government itself as final consumption. One can also see that the government input structure does not include an operating surplus so that wages and salaries form the major portion of government value added.

Data on source of income and

finance of government activities are derived from central and local government budgets (APBN and APBD). Both APBN and APBD are made up of two groups, namely, income group and expenditure group, and each group is further subdivided into routine and development income and expenditure.

Routine income covers all receipts in the form of direct taxes, indirect taxes, and non-tax receipts. Included in the non-tax receipts are receipts from governmental services such as health, education, courts, foreign affairs, property use, etc

Development income consists of domestic receipts in the form of government savings and foreign receipts in the form of project and program aid.

Routine expenditure is broken down into wages and salaries, purchase of goods, subsidies given to local governments, subsidies given to the business sector, rental payments, debt repayments, and other routine expenditure.

Development expenditure consists of expenditure items such as departmental and non-departmental development expenditure, development subsidies to

provinces, regencies and villages, development expenditure on primary school infrastructures and clinics, government investment on common stocks, and development expenditure through presidential decrees for market-places, roads, and reforestation.

Based on the data available in the APBN and APBD, three accounts are compiled which reflect the macroeconomic measures of general government activities.

These accounts are :

- a. General government production account,
- b. General government income and outlay account, and
- c. General government capital transaction account.

The source of data used to calculate the components of this three accounts for the central government is a data set on routine and development budget realization of the central government provided by The Ministry of Finance. For local governments, similar information is obtained from local government financial statistics made available for provincial government, regency government, and village government by the regional

branches of the Central Bureau of Statistics and the same data from Bappenas.

2.1 Production Account of General Government

As has been mentioned above, the output of the government is often difficult to measure because government activities generally involve the provision of public related services not available in the goods and services market. Therefore, central and local governments are treated as a production sector which consumes most of its production. The value of own-consumed output is derived by adding up the costs of its production, but reducing it by the value of government receipts from the sale of commodities produced and services rendered.

The general government production account records expenditure items on the left-hand side and production on the right-hand side. Expenditure items of general government to provide services for public consist of purchases of commodities, payment of wages and

salaries, depreciation, and indirect taxes, while production items include own-consumed output, and receipts from the sale of commodities produced and services rendered. The itemized content of the production account is described below.

a. Purchases of Goods for Intermediate Consumption

Purchase of goods is a general government expenditure category for the acquisition of non-durable goods which means that the goods is used up in the production process. The items covered by the government (central or local) intermediate consumption category are :

1. Purchases of writing utensils, printing material, and other office supplies,
2. Rental payments on storage and office spaces,
3. Costs of packing, storing, and transporting goods,
4. Meeting costs,
5. Guest reception costs,
6. Costs of electricity, telephone, telex, and water,
7. Costs of building and office

maintenance,

8. Cost of vehicle and office stationery maintenance,
9. Cost of official visits,
10. Payments of domestic interest and installments of debts, which also include unpaid bills on the use of telephone electricity, water, etc. and,
11. Other routine expenditure.

Expenditure items mentioned here include all transactions made within the boundary of the country or abroad financed by the routine budget. In addition, a fraction of the development budget may be transferred into routine expenditure due to the fact that the nature of that particular expenditure is similar to routine expenditure, such as the development budget for defence and security, funds channelled to research projects, provision of medical items through the family planning program, funds for censuses, educational projects etc.

b. Compensation of Employees

Compensation of employees items included here are :

1. *Wages and salaries in cash,*
2. *Wages and salaries in kind,*
3. *Retribution to social security schemes,*
4. *Retribution to pension funds,*
5. *Accident and life insurance, old-age savings, and the like.*

Wages and salaries in cash consist of principal plus additional wages for vacation, cost of living, etc. Including overtime salaries, honoraria, special bonuses, etc. However it is agreed that expenditure made by public officials to purchase working equipment such as special devices or uniforms are not included as part of salaries.

Wages and salaries in kind are goods, provided by the government for civilians and military personnel, such as rice, sugar, clothing, and those exclusively provided for the military such as allowances for meals, uniforms, family housing etc. These items may be provided free of charge or at a low price. Contributions to social security schemes are a type of grant given by the government to civilians or to military personnel. The last item in the list is retribution accumulated by employers for the purposes of pension support,

family aid, accident and health insurance, life insurance, and other benefits for employees.

c. Consumption of Fixed Capital

Consumption of fixed capital is that part of income put aside for the purpose of replacing the existing fixed capital items with new items, when the existing capital items cannot function properly. The value of this depreciation is usually an estimate which depends on the purchase value of the capital being considered. Because of lack of data, an estimate value of 5 percent of compensation of employees is being used in the compilation of the general government production account.

d. Net Indirect Taxes

Net indirect taxes is the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes paid by the government are merely the taxes or retribution for its activities in the real estate sector and taxes on the commodities produced. The government does not receive any subsidy. Data on tax payments by the

government are not yet available so that this item is left blank.

Expenditure items mentioned here include all transactions made within the boundary of the country or abroad financed by the routine budget. In addition, a fraction of the development budget may be transferred into routine expenditure due to the fact that the nature of the particular expenditure is similar to routine expenditure related to purchases of goods and compensation of employees, such as the development budget for defence and security, funds channelled to research projects, provision of medical items through the family planning program, funds for censused, educational projects etc.

e. Services Produced for Own Consumption

It has been mentioned that the output of general government cannot be valued using market prices so that the production value for own consumption is calculated by subtracting the values of commodities produced and non-commodity sales from the total expenditure of general government.

f. Non-commodity Sales

Revenue from non-commodity sales is defined as general government receipts from service activities provided to the public. Included here are service-related receipts such as :

1. Educational receipts i.e., general
2. government receipts from the operation of public schools such as tuition fees, examination fees, registration fees, and fees for practical examination work,
3. Receipts from hospitals, clinics, and other health institutions owned by the general government,
4. Ticket sales to general government-run recreation areas,
5. Service charges for completed work by general government workers,
5. Project-related receipts,
6. Half (50 percent) of rents and income for the use of fixed capital such as official housing, government dwellings, and mobile capitals such as heavy equipment etc,
7. Half of non-tax receipts from abroad, and
8. Forty percent of the item "other" in the central government revenue list.

g. Commodities Produced

This revenue category covers the sales of all commodities produced by all units of general government. These commodities are in general produced as secondary government activities in which the production process and the financial transactions cannot be separated from those of primary activities. Similar commodities may also be produced by the private business sector and are sold in the market at virtually the same price levels.

The general government revenue item from commodity sale covers :

- 1. Sales of agricultural products,*
- 2. Sales of livestock products,*
- 3. Sales of fisheries products,*
- 4. Sales of printing products, photos, films, posters, pictures, and maps,*
- 5. Sales of medicine, vaccines, and other pharmaceutical products,*
- 6. Receipts from registration of tenders,*
- 7. Receipts from development projects and local government enterprises,*
- 8. Half (50 percent) of rents and income for the use of fixed capital such as official housing, government dwellings, and mobile capitals such*

as heavy equipment etc, and

- 9. Twenty percent of the value of "other receipts" in the category of non-tax receipts.*

The principal source of data for income from commodities and non-commodities received by the central government is the itemized non-tax revenue from central government budget (APBN). Regional financial statistics provide similar information for regional government. However, in the latter the values of commodities and noncommodities are not distinguished so that a separation process is made according to the proportion of the two items in the central government's revenue.

2.2. Income And Outlay Accounts of General Government

The income and outlay accounts of general government delineate the general government's current receipts and disbursements. The transaction involved include those made between levels of general government and those between the general government and private sectors, public enterprises,

households, and the rest of the world.

The entries recorded on the right-hand side of the income and outlay account are the operating surplus, property income receipts, direct taxes, indirect taxes and other receipts. The left-hand side of the account records expenditure made by the general government which is broken down into general government final consumption expenditure, interest paid, subsidies, social assistance grants, general government transfers and savings.

The definitions of items used in the accounts are as follows :

a. Operating Surplus

Operating surplus is the net profit of the departmental enterprises (central and local) which the general government obtains. Since such enterprises, i.e., printing department in the governmental department, could not have a separate bookkeeping system from the general government's accounting system so those enterprises are considered as a governmental department as a whole, and then the operating surplus is estimated to be

zero.

b. Property Income Receipts

Property income is payment for the use of general government-owned properties which may be classified into three categories namely, (1) interest, (2) dividends and (3) net rents and royalties.

In the case of *tanah bengkok* (land granted to village officials) the income is counted as rent when the land is rented out but as dividend when the land is being used by others on a contract share basis. Both of those kinds are included this item.

Items included in property income are :

1. A fraction of the net profit earned by general government enterprises,
2. Ten percent of the value of "other receipts" in the category of non-tax
3. Land rent due to regional government revenue list, and
4. Royalty income from enterprises engaged in the field of forestry.

c. Indirect Taxes

Indirect taxes are those levied on

the production, sale, purchase or use of goods and services by business and are usually considered as costs of production. Three main categories of indirect taxes are distinguished in the account, i.e.:

1. Taxes on imports,
2. Taxes on domestic goods and services, and
3. Other indirect taxes.

Taxes on imports consist of :

- a. Sale taxes on imports, and
- b. Import duties.

Taxes on domestic goods and services include :

- a. Sale taxes,
- b. Excise duties,
- b. Export taxes,
- c. Income from domestic sales of oil,
- d. Taxes on motor vehicles,
- e. Taxes on radios,
- f. Taxes on fisheries products,
- g. Taxes on forestry products,
- h. Entertainment taxes,
- i. Development tax,
- j. Slaughter tax,
- k. Advertisement tax,
- l. Levies on liquors,
- m. Enterprise registration tax, and
- n. Tools and similar taxes levied by

local authorities.

Other indirect taxes cover :

- a. Nineteen percent of other taxes for central government⁴
- b. Half of the "other taxes" received by local government, and
- c. Thirty percent of other routine receipt for local receipt.
- d. Two third of tax on land and building (PBB).

d. Direct Taxes

There are two kinds of direct taxes: i.e., direct taxes on income and other direct taxes. Direct taxes on income are those levies imposed at regular intervals by general government on income from employment, property, and entrepreneurship. Other direct taxes are levies by public authorities on financial assets and taxes on the possession or use of goods by individuals and households. Household taxes on motor vehicle licenses paid to local government authorities are also included here, items

⁴The other taxes were separated into direct and indirect taxes based on the 1985 tax data from Directorate General of Taxation.

included as direct taxes⁵ are:

1. Taxes on oil companies,
2. Taxes on non-oil corporations, and
3. Income taxes include:
 - a. Household tax,
 - b. Tax on sales of assets,
 - c. Half of tax on motor vehicles,
 - d. Ground-tax,
 - e. Tax on foreigners,
 - f. Option on property taxes,
 - g. Tax on domestic animals (dogs), and
 - h. Road tax.
4. Other direct taxes, include:
 - a. Eighty one percent of the item "other taxes" in the central government.
 - b. One third of tax on land and
 - c. building (PBB),
 - d. Half of the "other taxes" received by local government,
 - e. Twenty percent of "other revenues"
 - f. of local government.

e. Compulsory Fees, Fines, and Penalties

⁵Due to the existence of the 1984 Income Tax Law, the central government data on taxes cannot be separated into income and non-oil corporate tax groups.

These are payments made by households with respect to services and facilities provided by the general government.

The items included are :

1. Charges for services of a regulatory character such as fees for visas, passports, license fees for registration of land and others,
2. Half of non-tax revenue from the rest of the world,
3. Receipts from legalization of rights and licenses,
4. Receipts from censorship, quarantine, supervising and inspection,
5. Marriage, divorce and remarriage service fees,
6. Financial services charge from financial institutions,
7. Confiscation fee,
8. Fee for signature legalization by ministers of justice,
9. Receipts from private legalization of letters,
10. License fees for registration of marriages, and births in the Office of the Public Registrar,
11. Fees and wages of court business

- clerk,
12. Penalties,
 13. Other incomes from courts and justice system,
 14. Requit against government losses,
 15. Twenty percent of other non-income taxes,
 16. Local government fines,
 17. Half of local government non-tax receipt,
 18. Ten percent of village government tax revenue, and
 19. Other village government receipts.

f. Unfunded Employee Welfare Contribution Imputed

Items included in this category are welfare benefits provided by the general government to its employees and their dependents such as pensions, discharge pay, medical care, etc. They are not channelled through a special fund. The various benefits are paid out as a part of wages and salaries on a case by case basis. The imputed value of the category is estimated to be equal to the general government expenditure on pensions.

g. Current Transfer to/from

Government, Households, and the Rest of The World

The transfer items covered here are transaction of funds between the general government, households and the rest of the world, which have no reciprocal flow of goods and services to compensate for the fund transacted, so that they do not affect production.

Transfers to central government are :

1. Repayment of unused allocated development budget,
2. Repayment of unused allocated routine budget,
3. Unallocated budget residual,
4. Repayment of loans,
5. Repayment of advance, and
6. Payment of uncollected foreign exchange.

Transfers from central government are :

1. Current transfer to other domestic sectors, and
2. Current transfer to regency and village government.

h. Final Consumption Expenditure

This flow is equivalent to the value of goods and services produced for own

use in current account (item 3 of production accounts), which is the value of gross output less sales of commodities and non-commodities produced.

i. Property Income Paid

Included here is the payment of interest on foreign and domestic debts.

j. Subsidies

This item includes all general government grants, in cash or in kind, given to private and public enterprises. Subsidies in kind are those used as intermediate goods, so that grants in the form of capital goods or in the form of cash are not included. The subsidies are intended for the purpose of maintaining prices, covering for operating losses, etc. The figures covered here are subsidies for oil and fertilizers.

k. Social Assistance Grants

This category of transfer includes all general government grants given directly to individuals or households. It includes grants made by general government on

account of disasters, warfare, and scholarships for individuals.

l. Savings

This item is defined as a balancing item in the income and outlay account, i.e., the discrepancy between receipts and disbursements.

2.3. Capital Transactions Account of General Government

The capital transactions account of general government is an account showing general government transactions concerning capital formation with other sectors and the rest of the world. The left side of the account records the value of capital goods categories, namely, increase in stocks, gross fixed capital formation, purchases of land, purchases of intangible goods and capital transfer to other sectors or the rest of the world. The right-hand side of the account contains categories of sources of funds used to finance the capital goods appearing on the left-hand side of the account, namely, savings, allowance for the consumption of capital goods, and net capital transfers and

loans. The description of classification and sources of data used to compile the general government capital account are given below.

a. Increase in Stock

Stock may consist of intermediate goods to be used in the production process, unfinished goods and unsold finished goods. Those who hold stock, therefore, are business enterprises, state enterprises, and government. Goods categorized as general government stock are those held for strategic purposes such as foodstuffs. Stock change in a particular year is defined as the difference between the year's final stock and the initial stock. However, stock data on strategic goods are not yet available; for that reason, data on general government changes in stock are left unfilled.

b. Gross Fixed Capital Formation

Gross fixed capital formation in the general government sector is defined as the difference between general government expenditure on additions to its fixed assets and net sales of similar

second-hand and scrapped goods. Items classified as fixed capital formation in this sector, according to the SNA manual, are :

1. Dwelling and non-dwelling buildings,
2. Road, bridge and similar constructions,
3. Machineries and equipments,
4. Motor vehicles,
5. Major repair and alteration of the above durable goods which significantly extend their lifetime or productivity, and
6. Outlays on the reclamation and improvement of land and the development of plantations.

The capital formation data on the general government sector for this publication are obtained from :

1. The development expenditure of the central government. However, expenditure which cannot be categorized as expenditure for capital formation such as subsidy on fertilizers, most of the development budget for the armed forces, and the development budget for non-durable items were taken out of the development budget for the armed forces, only that part used for

building dwelling units for military personnel is included while the other part is considered as consumption expenditure. Included in expenditure on non-durable are outlays on medicine, family planning programs, teacher training, research, and the like. Information on these are available on budgetary forms submitted by project officers. The expenditure on non-durable goods is treated as a routine expense in the production account.

2. The development expenditure of provincial governments, regency governments, and village governments were obtained from survey returns on the budget of these levels of government. The items included are :

- a. Outlay on repairs of roads, bridges, irrigation installations and government-owned buildings,
- b. Outlay on new buildings, roads, bridges, irrigation, infrastructure, etc.,
- c. Capital outlay on vehicles, machines, and office equipment, and

d. Other development outlays.

c. Purchases of Land

General government agencies are often involved in land transactions, either with another general government agency or private, for example when the general government needs land for military installations, or for settlement of industrial development. This expenditure should not be included in gross fixed capital formation, because it involves non-reproducible capital goods. However, since the actual figures could not be separated out from development expenditure they were still included in the gross fixed capital formation figure. This weakness will be corrected when appropriate data are available.

d. Purchases of Intangible Assets

Included in this category are purchases of capital goods such as natural resource concessions, fishing areas, patents, and trade marks. The transaction figure presented should be a net figure, i.e., purchases less sales. However, data on purchases and sales

of intangible goods can not be separated out from the other development expenditure on capital goods, so that the figure for this item does not appear separately in the account.

e. Capital Transfer Received and Capital Transfer Paid

Capital transfers are defined as non-current unrequited transfers which are not in general considered by the recipient as adding to his current income or by the payer as reducing his current income.

In practice it is sometimes difficult to distinguish between a current transfer and a capital transfer. One party may regard a transfer as current while the other regards it as a capital transfer.

The rule to be followed is to consider all mixed transfers as capital transfers. Capital transfers may take place between levels of government, between general governments and the rest of the world, between general government and private, etc. In this presentation four kinds of capital transfer are distinguished.

1. Domestic capital transfers consist of :

- a. Tax on land and building (PBB):
The amount of PBB paid by the central government is assumed to be equal to the total amount received by provincial governments, regency governments, and village governments. The data on the amount received by regional government are obtained from the incoming side of the regional governments financial form,
- b. Development subsidy given to regional governments,
2. Development receipts of higher levels of governments.
3. Capital transfer from the rest of the world, this item is estimated from government grant in the Indonesian balance of payments.
4. Capital transfer to local governments covers development subsidies for provincial governments, regency governments, village governments and expenditure from land tax.
5. Capital transfer to other domestic sectors consists of the amount of government capital invested in private sectors.

f. Savings

This is the balancing item of the income and outlay account which is now in the capital transactions account as a source of income.

g. Consumption of Fixed Capital

This item is the same item of the expenditure side of the production account; in the capital transaction account it becomes a resource fund for financing the purchase of capital goods.

h. Net Borrowing

This is the balancing item in the capital transactions account.

<http://www.bps.go.id>



III. DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE ACCOUNTS' COMPONENTS 2001-2006

As for other sectors¹, transactions made by the general government sector are aggregated into three separated but related accounts, namely the production account, the income and outlay account, and the capital account. Each account has its own categories.

Various kinds of analysis may of course be performed on those components of the accounts. Trend analysis and others which require time-series data can be performed only if the data is available in constant price. Since general government accounts cover transactions measured in current prices only, the kind of analysis attempted here is only what may be termed a vertical analysis in which we try to compare the relative magnitudes of the components of the accounts and how they change in time. In this way we may observe how these magnitudes develop, although only in percentage forms, over the years covered by this report i.e.,

¹The term "sector" in this publication refers to institution, not economic sector (industrial sector).

2001 through 2006. From the ratios between the various components in the accounts and their year to year variation, one can then examine the relative fluctuations of every important government financial item, whether it is an expenditure or revenue item.

Here we tried to calculate various ratios which are expected to become useful indicators. These will be presented both in table and graph forms. Among the entire components of general government accounts seven items—**purchases of goods and services, compensation of employee, consumption expenditure, gross savings** (savings + depreciation), **gross fixed capital formation, subsidies,** and **taxes**—seem to represent the core of the variables whose movements are worth to be analyzed.

Besides, those seven components can also be observed in more detailed coverage, i.e. central, provincial, regency and village governments. In the following description, those components were examined as percentages to other important accounts components, either

their magnitudes and changes at various level of government. Due to the implementation of regional autonomy starting on 2001, it seems there is decreased percentage on those seven components belong to central government. On contrary there is increased percentage on those components belong to provincial, regency and village governments.

3.1. Purchase of Goods

The proportion of general government revenue appropriated for the purchase of goods increased from 2001 to 2006 except 2004. It ranges from 12 percent to 21 percent in the years of observation. Detailed figures can be seen on Table 3.1 and the graph is on Graph 3.1.a. The average is out at 17.69 percent.

Table 3.4 shows proportion of general government goods purchase of each level of government. There is a decrease in the proportion of central government disbursement on purchase of goods along the period 2001 to 2003 but increased from 2004 to 2006, with average is as much as 59.55 percent, it goes down significantly from 67.69 percent in 2001, to 56.63 percent in 2002 and 50.57 percent in 2003, then

grows to 50,88 percent in 2004, 61,35 percent in 2005 and 70,18 percent in 2006.

On the contrary, purchases of goods disbursed by level province, regency and village government are increased from 2000 to 2004 then decreased from 2004 to 2005 and increased from 2005 to 2006. The average of each level is 12.72; 26.45 and 1.28 percent consecutively (see Graph 3.4).

3.2. Compensation of Employees

Compensation of employees mainly absorb the general government revenue. On average, 23.54 percent is spent to pay the wages and salaries of government employees and military personnel. The complete figures from 2001 through 2006 can be found in Table 3.1. It can be seen there that the percentage ranges from 21.85 to 25.21. The rather sharp year-to-year fluctuations which graph 3.1.a shows for this particular item may have been caused by some changing in government payroll system and relatively high variations in annual general government revenues.

The proportions of the items relative to GDP are also calculated. Table 3.2 and graph 3.2 depict the year-to-year figures. During the six-year period covered by the data it is found that the average share of general government employees compensation in the national value added is 4.45 percent, which is not a long way from being either the lowest or the highest figure of the series.

The portion of compensation of employees which details specified by the level of government can be seen on Table 3.5. The table shows in 2001-2002 and 2004-2005 that the portion decreases for central and province. On the contrary in regency and village level governments increased from 2001 to 2002 and decreased in 2003 and 2005-2006. (see Graph 3.5).

3.3. Consumption Expenditure

Because a large part of general government revenue is taken up by the previous two items i.e. the purchase of goods and the compensation of employees, the fluctuations in the ratio of general government consumption expenditure will be affected by the magnitude of those two items.

As can be seen from Table 3.1, also

depicted in graph form, these fluctuations can be considered as fairly constant, which means that general government consumption expenditure is approximately a function of its revenue. It averages 41.72 percent during the 2001 to 2006 period. Graph 3.1.a also shows that general government consumption is highly correlated with the compensation of employees.

When compared to GDP, general government consumption expenditure averages 7.88 percent. The figures in Table 3.2 do not indicate any sharp fluctuations. The range of the ratios is from 6.89 percent to 8.63 percent.

In Table 3.6 and Graph 3.6, the relative shares of the various levels of government hierarchies are shown. From these it can be seen that about 58.85 percent of consumption occurs in the central government, 11.67 percent in the provincial government, 29.72 percent in the regency government, and only 1.76 percent in the village government.

3.4. Gross Savings

General government gross savings are an item of the general government production and Income and Outlay Account. As a percentage of general

government revenue, this item shows a rather large variation. The percentage figures are 16.06; 23.88; 28.44; 23.53; 20.75 and 26.89 percent for 2001 through 2006, respectively, as can be seen from Table 3.1. This may imply that the general government's ability to invest also varied from year to year during the period.

In Table 3.2 the shares of government savings in GDP during the period of 2001 through 2006 are shown. They average out at 4.39 percent.

As a percentage of the general government gross savings, in total gross fixed capital formation play a fairly important role during the period of 2001 through 2006 span covered by the data, averaging out at 24.33 percent. The percentage was lowest in 2001 (15.98) and highest in 2006 (37.46). The detailed figures are presented in Table 3.3 and in graph form in Graph 3.3. This table shows that over 15 percent of gross fixed capital formation is financed by general government gross savings.

The share of general government gross savings in general government gross fixed capital formation averaging out at 126.84 percent. The lowest was 96.54 percent in 2001 and the highest was 159.23 percent in 2006, but no

general pattern is seen (Table 3.3 and Graph 3.3).

Table 3.7 shows proportions of general government gross savings detailed by level of government. The biggest portion of general government gross savings is held by the central government with averages 83.16 percent along the period 2001 through 2006. Followed by savings implemented by provincial, regency and village governments with averages 4.18; 11,51 and 1.15 percent consecutively.

3.5. Gross Fixed Capital Formation

The share of general government in national gross fixed capital formation has been decreasing. This can be seen in Table 3.3, where the ratios between general government gross fixed capital formation and national gross fixed capital formation are presented. The average ratio for the 2001-2006 period covered by the data is found to be 18.91 percent. This large percentage is no doubt a reflection of what has been achieved by the government in the national economic development programs.

The share of general government gross fixed capital formation in the GDP

is also decreasing. The percentage figures for the 2001-2006 period covered by the data are shown in Table 3.2 and in graph form in Graph 3.2. During the 2001-2006 period it is found that 3.46 percent of GDP finds its origin in general government gross fixed capital formation.

Among the levels of government, it is found that the central government dominates the bulk of the items. From Table 3.8 and Graph 3.8 this division of expenditure is shown. The average figure for central government is 50.71 percent while for provincial governments, regency governments, and village governments, the figures were 15.72; 31.18 and 2.39 percent, respectively.

3.6. Subsidies

The proportion of subsidies to general government revenue varies from year to year because the amount that can be offered by the government must be linked to the availability of funds. The average percentage for the period of 2001-2006 is 17.81 percent. The highest percentage was 24.04 and 23.01 percent (in 2001 and 2005) and the lowest was 11.70 percent (in 2003). The

detailed figures can be found in Table 3.1 and are depicted by Graph 3.1.b.

As a ratio of GDP the average percentage is 3.39. The exact figures for the period are 4.70 percent, 2.20 percent, 2.15 percent, 3.72 percent, 4.33 percent and 3.22 percent (see Table 3.2 and Graph 3.2).

3.7. Taxes

Taxes are the main source of general government revenue. The percentage of tax revenue does not vary much. During the period of 2001-2006 the average tax revenue over total revenue is 67.28 percent, a combination of 33.99 percent as direct taxes and 33.06 percent as indirect taxes. The proportion has included in it the taxes levied on oil corporations, the largest source of government income.

The highest percentage of tax revenue occurred in 2005. At that time tax revenue was 70.30 percent of total general government revenue, consisting of 37.04 percent direct and 33.25 percent indirect taxes. The lowest percentage occurred in 2001 when the tax revenue dropped to 61.65 percent. The drop did not affect the direct and indirect component by equal proportion.

The gap between the highest tax level and the lowest level is found to be 9.45 percent. The size of this magnitude is striking considering the size of total tax revenue. The detailed figures of tax percentage can be seen in Table 3.1 and Graph 3.1.b.

Central government tax revenue holds the biggest proportion of the whole tax revenues. It reaches 93.97 percent in average in the period 2001-2006 (see Table 3.9 and Graph 3.9). The average of tax revenues collected by level province, regency and village governments are 4.53; 1.32 and 0.18 percent consecutively.

By looking at the graphs of the seven variables considered, one may generalize that the patterns of their percentages are not similar nature. Tax revenue and gross savings, for example, are less unstable percentage.

Therefore, from the point of view of percentage figures alone a clear relationship between the seven variables is not seen. However, two pairs of variables seem to show at least positive correlations. General government consumption expenditure and compensation of employees make up the first pair.

Those two variables move together so

that it can be hypothesized that they are controlled by a third variable. The second pair consists of general government gross savings and gross fixed capital formation. The two move together, although slope differences occur here and there, so that a high correlation coefficient is expected. A high correlation between savings and capital formation is, of course, logical according to macroeconomic theory because the largest source of gross fixed capital formation comes from gross savings.

TABEL LAMPIRAN

APPENDIX

Tabel : 1.a NERACA PRODUKSI PEMERINTAHAN UMUM
 Table : 1.a PRODUCTION ACCOUNTS OF GENERAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya						
<i>Input</i>						
1. Belanja barang / <i>Intermediate consumption</i>	40 800 601	54 432 464	68 840 834	78 862 854	102 279 118	136 342 128
2. Belanja pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	75 236 511	76 182 628	90 416 348	109 112 224	119 145 547	147 119 174
3. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	6 614 386	7 110 833	11 189 274	12 017 327	15 987 159	20 680 469
4. Pajak tak langsung neto / <i>Net indirect taxes</i>	-	-	-	-	-	-
Produksi						
<i>Ouput</i>						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri / <i>Production for own consumption</i>	113 416 077	132 218 680	163 701 240	191 055 628	224 980 540	288 079 870
6. Penerimaan dari jasa / <i>Non-commodity sales</i>	5 944 960	4 328 571	5 447 043	6 477 532	10 820 973	13 992 515
7. Produksi berupa barang / <i>Commodities produced</i>	3 290 461	1 178 674	1 298 174	2 459 245	1 610 311	2 069 386
JUMLAH BIAYA / PRODUKSI						
<i>TOTAL INPUT / OUTPUT</i>	122 651 498	137 725 925	170 446 456	199 992 405	237 411 824	304 141 771

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 1.b NERACA PRODUKSI PEMERINTAHAN PUSAT
Table : 1.b **PRODUCTION ACCOUNTS OF CENTRAL GOVERNMENT**

TAHUN / YEAR : 2001-

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya						
<i>Input</i>						
1. Belanja barang / <i>Intermediate consumption</i>	27 618 913	30 826 061	34 809 714	40 125 840	62 743 530	95 691 504
2. Belanja pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	43 318 674	43 259 351	55 482 192	62 943 880	55 589 251	72 872 610
3. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	5 018 494	5 464 669	9 442 566	9 708 910	7 370 699	11 786 217
4. Pajak tak langsung neto / <i>Net indirect taxes</i>	-	-	-	-	-	-
Produksi						
<i>Output</i>						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri / <i>Production for own consumption</i>	68 733 838	75 730 079	94 513 532	105 655 837	116 814 636	167 877 202
6. Penerimaan dari jasa / <i>Non-commodity sales</i>	4 693 728	3 218 160	4 441 146	5 363 484	7 880 418	10 866 115
7. Produksi berupa barang / <i>Commodities produced</i>	2 528 515	601 842	779 794	1 759 309	1 008 426	1 607 015
JUMLAH BIAYA / PRODUKSI						
TOTAL INPUT / OUTPUT	75 956 081	79 550 081	99 734 472	112 778 630	125 703 480	180 350 331

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 1.c **NERACA PRODUKSI PEMERINTAHAN PROPINSI**
Table : 1.c PRODUCTION ACCOUNTS OF PROVINCIAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya						
<i>Input</i>						
1. Belanja barang / <i>Intermediate consumption</i>	4 557 842	8 171 718	9 968 771	11 559 982	12 117 554	12 459 310
2. Belanja pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	9 440 522	9 597 657	9 970 691	10 955 222	11 162 560	13 040 120
3. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	472 026	479 883	498 535	547 761	3 451 727	3 563 010
4. Pajak tak langsung neto / <i>Net indirect taxes</i>	-	-	-	-	-	-
Produksi						
<i>Ouput</i>						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri / <i>Production for own consumption</i>	13 545 121	17 583 499	19 859 984	22 452 507	25 384 016	27 696 986
6. Penerimaan dari jasa / <i>Non-commodity sales</i>	557 114	459 862	402 252	367 563	994 916	1 189 531
7. Produksi berupa barang / <i>Commodities produced</i>	368 155	205 897	175 760	242 895	352 909	175 922
JUMLAH BIAYA / PRODUKSI						
TOTAL INPUT / OUTPUT	14 470 390	18 249 258	20 437 997	23 062 965	26 731 841	29 062 440

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 1.d **NERACA PRODUKSI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**
Table : 1.d PRODUCTION ACCOUNTS OF REGENCIAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya						
<i>Input</i>						
1. Belanja barang / <i>Intermediate consumption</i>	8 228 441	14 662 950	23 236 630	25 818 181	26 047 132	26 781 748
2. Belanja pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	20 943 155	21 608 754	23 243 045	33 452 466	49 774 049	58 146 122
3. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	1 047 158	1 080 438	1 162 152	1 672 623	4 906 496	5 064 680
4. Pajak tak langsung neto / <i>Net indirect taxes</i>	-	-	-	-	-	-
Produksi						
<i>Ouput</i>						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri / <i>Production for own consumption</i>	29 130 845	36 330 658	46 695 562	59 739 744	78 533 062	87 769 231
6. Penerimaan dari jasa / <i>Non-commodity sales</i>	694 118	650 549	603 644	746 485	1 945 639	1 936 871
7. Produksi berupa barang / <i>Commodities produced</i>	393 791	370 935	342 620	457 041	248 976	286 448
JUMLAH BIAYA / PRODUKSI						
<i>TOTAL INPUT / OUTPUT</i>	30 218 754	37 352 142	47 641 827	60 943 270	80 727 677	89 992 550

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 1.e **NERACA PRODUKSI PEMERINTAHAN DESA**
Table : 1.e PRODUCTION ACCOUNTS OF VILLAGE GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Biaya						
<i>Input</i>						
1. Belanja barang / <i>Intermediate consumption</i>	395 405	771 735	825 719	1 358 852	1 370 902	1 409 566
2. Belanja pegawai / <i>Compensation of Employees</i>	1 534 160	1 716 866	1 720 421	1 760 656	2 619 687	3 060 322
3. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	76 707	85 843	86 021	88 033	258 236	266 562
4. Pajak tak langsung neto / <i>Net indirect taxes</i>	-	-	-	-	-	-
Produksi						
<i>Ouput</i>						
5. Produksi yang dikonsumsi sendiri / <i>Production for own consumption</i>	2 006 272	2 574 444	2 632 161	3 207 541	4 248 825	4 736 450
6. Penerimaan dari jasa / <i>Non-commodity sales</i>	-	-	-	-	-	-
7. Produksi berupa barang / <i>Commodities produced</i>	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BIAYA / PRODUKSI						
TOTAL INPUT / OUTPUT	2 006 272	2 574 444	2 632 161	3 207 541	4 248 825	4 736 450

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 2.a NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN UMUM
Table : 2.a INCOME AND OUTLAY ACCOUNTS OF GENERAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Pengeluaran</u> <i>Expenditure</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi / <i>Final consumption expenditure</i>	113 416 077	132 218 680	163 701 240	191 055 628	224 980 540	288 079 870
2. <i>Property income</i> yang dibayarkan/ <i>Property income paid</i>	<u>81 412 763</u>	<u>75 278 411</u>	<u>62 288 977</u>	<u>62 350 503</u>	<u>57 650 778</u>	<u>79 025 759</u>
a. Bunga / <i>Interest</i>	81 412 763	75 278 411	62 288 977	62 350 503	57 650 778	79 025 759
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah / <i>Land rent & royalties</i>	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi / <i>Subsidies</i>	77 452 576	40 006 324	43 208 119	85 463 976	120 707 802	107 452 819
4. Bantuan sosial / <i>Social assistance grants</i>	2 977 663	3 385 863	3 949 301	1 874 440	25 135 842	34 154 801
5. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Unfunded employee welfare</i>	1 774 086	1 814 922	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580
6. Transfer kepada / <i>Current transfer to :</i>	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan / <i>Savings</i>	45 126 404	69 918 896	93 802 843	89 839 124	92 825 795	160 401 394
<u>JUMLAH PENGELUARAN</u> <u>TOTAL DISBURSEMENTS</u>	322 159 569	322 623 096	369 165 571	432 897 183	524 524 939	673 326 223

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Lanjutan / *Continued*Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Penerimaan <i>Receipts</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih / <i>Operating surplus</i>	-	-	-	-	-	-
2. <i>Property income</i> yang diterima / <i>Property income receipts</i>	<u>108 431 251</u>	<u>87 384 000</u>	<u>92 324 359</u>	<u>110 556 723</u>	<u>132 545 712</u>	<u>206 783 781</u>
a. Bunga / <i>Interest</i>	-	1 000 578	36 607	-	1 975	1 787 610
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	9 063 360	10 715 466	13 101 458	10 732 946	14 495 464	26 200 233
c. Sewa tanah / <i>Landrent & royalties</i>	99 367 891	75 667 956	79 186 294	99 823 777	118 048 273	178 795 938
3. Pajak tak langsung / <i>Indirect taxes</i>	<u>92 697 407</u>	<u>111 192 721</u>	<u>128 480 364</u>	<u>147 997 977</u>	<u>174 427 118</u>	<u>205 595 533</u>
a. Pajak import / <i>Import duty</i>	21 314 649	30 728 401	32 927 126	43 828 976	62 263 021	56 937 609
b. Pajak hasil produksi D.N. / <i>Taxes on domestic goods and services</i>	65 075 329	73 044 440	85 630 030	91 970 090	95 797 997	128 916 027
c. Pajak tak langsung lainnya / <i>Other indirect taxes</i>	6 307 429	7 419 880	9 923 208	12 198 911	16 366 100	19 741 897
4. Pajak langsung / <i>direct taxes</i>	<u>105 899 390</u>	<u>109 931 825</u>	<u>127 316 426</u>	<u>149 483 244</u>	<u>194 299 110</u>	<u>233 305 654</u>
a. Pajak perseroan minyak / <i>Oil company taxes</i>	23 101 656	17 215 356	18 780 899	22 946 615	34 985 563	43 190 107
b. Pajak bukan perseroan minyak / <i>Non-oil company taxes</i>	79 560 282	89 288 803	103 831 000	121 445 897	152 800 629	183 368 177
c. Pajak pendapatan / <i>Income taxes</i>	3 237 452	3 427 666	4 704 527	5 090 732	6 512 918	6 747 370
d. Pajak langsung lainnya / <i>Other direct taxes</i>	10 890 460	6 215 865	8 130 296	7 143 653	9 977 453	12 601 604
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda / <i>Compulsory fees fines & penalties</i>	1 774 086	1 814 922	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580
6. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Un-funded employee contribution</i>	<u>2 466 975</u>	<u>6 083 763</u>	<u>10 699 035</u>	<u>15 402 074</u>	<u>10 051 364</u>	<u>10 828 071</u>
7. Transfer dari / <i>Current transfer from :</i>	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	2 466 975	6 083 763	10 699 035	15 402 074	10 051 364	10 828 071
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN <i>TOTAL RECEIPTS</i>	322 159 569	322 623 096	369 165 571	432 897 183	524 524 939	673 326 223

*) Angka sementara / preliminary figure

Tabel : 2.b NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN PUSAT
 Table : 2.b INCOME AND OUTLAY ACCOUNTS OF CENTRAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Pengeluaran</u> <i>Expenditure</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi / <i>Final consumption expenditure</i>	68 733 838	75 730 079	94 513 532	105 655 837	116 814 636	167 877 202
2. <i>Property income</i> yang dibayarkan/ <i>Property income paid</i>	81 320 818	75 119 608	62 146 744	62 350 503	57 650 778	79 025 759
a. Bunga / <i>Interest</i>	81 320 818	75 119 608	62 146 744	62 350 503	57 650 778	79 025 759
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah / <i>Land rent & royalties</i>	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi / <i>Subsidies</i>	77 452 576	40 006 324	43 208 119	85 463 976	120 707 802	107 452 819
4. Bantuan sosial / <i>Social assistance grants</i>	-	-	-	-	22 421 048	30 222 903
5. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Unfunded employee welfare</i>	1 774 086	1 814 922	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580
6. Transfer kepada / <i>Current transfer to :</i>	30 523 341	36 764 838	44 462 799	74 378 363	80 549 714	129 009 249
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	30 523 341	36 764 838	44 462 799	74 378 363	80 549 714	129 009 249
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan / <i>Savings</i>	34 459 423	66 366 002	89 845 661	72 586 513	87 115 369	109 877 979
<u>JUMLAH PENGELUARAN</u> <u>TOTAL DISBURSEMENTS</u>	294 264 082	295 801 773	336 391 946	402 748 704	488 483 529	627 677 491

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Lanjutan / *Continued*Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Penerimaan <i>Receipts</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih / <i>Operating surplus</i>	-	-	-	-	-	-
2. <i>Property income</i> yang diterima / <i>Property income receipts</i>	<u>96 942 892</u>	<u>76 866 483</u>	<u>80 472 916</u>	<u>102 043 151</u>	<u>125 746 631</u>	<u>137 728 636</u>
a. Bunga / <i>Interest</i>	-	1 000 578	36 607	-	1.975	1.787.610
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	8 809 191	10 300 977	12 613 914	9 817 535	12 776 686	22 973 056
c. Sewa tanah / <i>Landrent & royalties</i>	88 133 701	65 564 928	67 822 395	92 225 616	112 967 970	112 967 970
3. Pajak tak langsung / <i>Indirect taxes</i>	<u>88 515 046</u>	<u>106 392 721</u>	<u>123 080 364</u>	<u>141 197 976</u>	<u>165 427 119</u>	<u>193 595 533</u>
a. Pajak import / <i>Import duty</i>	21 314 649	30 728 401	32 927 126	43 828 976	62 263 021	56 937 609
b. Pajak hasil produksi D.N. / <i>Taxes on domestic goods and services</i>	61 504 080	69 095 356	81 308 034	85 641 193	87 526 998	117 099 830
c. Pajak tak langsung lainnya / <i>Other indirect taxes</i>	5 696 317	6 568 964	8 845 204	11 727 807	15 637 100	19 558 094
4. Pajak langsung / <i>direct taxes</i>	<u>97 594 818</u>	<u>102 553 086</u>	<u>117 201 048</u>	<u>139 675 829</u>	<u>181 406 611</u>	<u>215 458 823</u>
a. Pajak perseroan minyak / <i>Oil company taxes</i>	23 101 656	17 215 356	18 780 899	22 946 615	34 985 563	43 190 107
b. Pajak bukan perseroan minyak / <i>Non-oil company taxes</i>	71 934 086	82 477 342	94 704 895	111 952 551	140 394 130	165 643 880
c. Pajak pendapatan / <i>Income taxes</i>	2 559 076	2 860 388	3 715 254	4 776 663	6 026 918	6 624 836
<i>Other direct taxes</i>	2 559 076	2 860 388	3 715 254	4 776 663	6 026 918	6 624 836
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda / <i>Compulsory fees fines & penalties</i>	6 970 265	2 090 798	2 723 493	2 116 162	2 627 624	3 423 686
6. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Un-funded employee contribution</i>	1 774 086	1 814 922	2 215 091	2 313 512	3 224 182	4 211 580
7. Transfer dari / <i>Current transfer from :</i>	<u>2 466 975</u>	<u>6 083 763</u>	<u>10 699 034</u>	<u>15 402 074</u>	<u>10 051 362</u>	<u>10 828 071</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	2 466 975	6 083 763	10 699 034	15 402 074	10 051 362	10 828 071
JUMLAH PENERIMAAN <i>TOTAL RECEIPTS</i>	<u>294 264 082</u>	<u>295 801 773</u>	<u>336 391 946</u>	<u>402 748 704</u>	<u>488 483 529</u>	<u>565 246 329</u>

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 2.c NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN PROPINSI
 Table : 2.c INCOME AND OUTLAY ACCOUNTS OF PROVINCIAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Pengeluaran</u> <i>Expenditure</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi / <i>Final consumption expenditure</i>	13 545 121	17 583 499	19 859 984	22 452 507	25 384 016	27 696 986
2. <i>Property income</i> yang dibayarkan/ <i>Property income paid</i>	59 915	125 397	31 751	-	-	-
a. Bunga / <i>Interest</i>	59 915	125 397	31 751	-	-	-
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah / <i>Land rent & royalties</i>	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi / <i>Subsidies</i>	-	-	-	-	-	-
4. Bantuan sosial / <i>Social assistance grants</i>	1 810 526	2 220 487	1 514 857	456 025	660 470	956 574
5. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Unfunded employee welfare</i>	-	-	-	-	-	-
6. Transfer kepada / <i>Current transfer to :</i>	786 627	892 659	2 765 679	10 011 824	10 796 945	11 755 579
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	786 627	892 659	2 765 679	10 011 824	10 796 945	11 755 579
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan / <i>Savings</i>	1 900 581	148 722	405 898	1 378 449	2 321 458	17 497 671
<i>JUMLAH PENGELUARAN</i> <i>TOTAL DISBURSEMENTS</i>	18 102 770	20 970 764	24 578 169	34 298 805	39 162 889	57 906 810

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Lanjutan / *Continued*Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Penerimaan <i>Receipts</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih / <i>Operating surplus</i>	-	-	-	-	-	-
2. <i>Property income</i> yang diterima / <i>Property income receipts</i>	<u>3 351 410</u>	<u>3 818 096</u>	<u>2 945 115</u>	<u>2 038 914</u>	<u>1 970 234</u>	<u>1 970 234</u>
a. Bunga / <i>Interest</i>	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	145 670	257 472	289 071	502 052	942 653	942 653
c. Sewa tanah / <i>Landrent & royalties</i>	3 205 740	3 560 624	2 656 044	1 536 862	1 027 581	1 027 581
3. Pajak tak langsung / <i>Indirect taxes</i>	<u>2 817 844</u>	<u>3 203 759</u>	<u>3 580 093</u>	<u>5 530 421</u>	<u>6 713 865</u>	<u>6 713 865</u>
a. Pajak import / <i>Import duty</i>	-	-	-	-	-	-
b. Pajak hasil produksi D.N. / <i>Taxes on domestic goods and services</i>	2 573 638	3 087 739	3 313 897	5 335 259	6 476 220	6 476 220
c. Pajak tak langsung lainnya / <i>Other indirect taxes</i>	244 206	116 020	266 196	195 162	237 645	237 645
4. Pajak langsung / <i>direct taxes</i>	<u>6 167 960</u>	<u>5 422 193</u>	<u>7 587 077</u>	<u>8 132 997</u>	<u>9 872 760</u>	<u>9 872 760</u>
a. Pajak perseroan minyak / <i>Oil company taxes</i>	-	-	-	-	-	-
b. Pajak bukan perseroan minyak / <i>Non-oil company taxes</i>	6 005 156	5 344 846	7 409 613	8 002 889	9 714 330	9 714 330
c. Pajak pendapatan / <i>Income taxes</i>	-	-	-	-	-	-
d. Pajak langsung lainnya / <i>Other direct taxes</i>	162 804	77 347	177 464	130 108	158 430	158 430
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda / <i>Compulsory fees fines & penalties</i>	891 528	806 100	1 128 697	1 489 449	2 079 596	2 079 596
6. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Un-funded employee contribution</i>	-	-	-	-	-	-
7. Transfer dari / <i>Current transfer from :</i>	<u>4 874 028</u>	<u>7 720 616</u>	<u>9 337 187</u>	<u>17 107 024</u>	<u>18 526 434</u>	<u>18 526 434</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	4 874 028	7 720 616	9 337 187	17 107 024	18 526 434	18 526 434
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN TOTAL RECEIPTS	18 102 770	20 970 764	24 578 169	34 298 805	39 162 889	39 162 889

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 2.d NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN
Table : 2.d INCOME AND OUTLAY ACCOUNTS OF REGENCIAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Pengeluaran</u> <i>Expenditure</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi / <i>Final consumption expenditure</i>	29 130 845	36 330 658	46 695 562	59 739 744	78 533 062	87 769 231
2. <i>Property income</i> yang dibayarkan/ <i>Property income paid</i>	<u>32 032</u>	<u>33 406</u>	<u>110 481</u>	-	-	-
a. Bunga / <i>Interest</i>	32 032	33 406	110 481	-	-	-
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah / <i>Land rent & royalties</i>	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi / <i>Subsidies</i>	-	-	-	-	-	-
4. Bantuan sosial / <i>Social assistance grants</i>	1 060 927	1 048 838	2 190 999	1 276 574	1 848 892	2 677 792
5. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Unfunded employee welfare</i>	-	-	-	-	-	-
6 Transfer kepada / <i>Current transfer to :</i>	<u>2 436 955</u>	<u>1 671 620</u>	<u>906 074</u>	<u>7 206 916</u>	<u>7 950 605</u>	<u>8 656 520</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	2 436 955	1 671 620	906 074	7 206 916	7 950 605	8 656 520
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan / <i>Savings</i>	7 297 832	3 310 107	3 530 544	14 655 251	2 463 333	31 063 000
<u>JUMLAH PENGELUARAN</u> <u>TOTAL DISBURSEMENTS</u>	39 958 591	42 394 629	53 433 660	82 878 485	90 795 892	130 166 543

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Lanjutan / *Continued*Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Penerimaan <i>Receipts</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih / <i>Operating surplus</i>	-	-	-	-	-	-
2. <i>Property income</i> yang diterima / <i>Property income receipts</i>	<u>7 965 529</u>	<u>6 552 871</u>	<u>8 625 245</u>	<u>6 251 484</u>	<u>4 629 653</u>	<u>4 629 653</u>
a. Bunga / <i>Interest</i>	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	97 649	141 315	178 626	372 024	698 513	698 513
c. Sewa tanah / <i>Landrent & royalties</i>	7 867 880	6 411 556	8 446 619	5 879 460	3 931 140	3 931 140
3. Pajak tak langsung / <i>Indirect taxes</i>	<u>951 203</u>	<u>1 251 703</u>	<u>1 416 668</u>	<u>872 124</u>	<u>1 568 224</u>	<u>1 568 224</u>
a. Pajak import / <i>Import duty</i>	-	-	-	-	-	-
b. Pajak hasil produksi D.N. / <i>Taxes on domestic goods and services</i>	584 297	516 807	604 859	596 183	1 076 868	1 076 868
c. Pajak tak langsung lainnya / <i>Other indirect taxes</i>	366 906	734 896	811 809	275 941	491 356	491 356
4. Pajak langsung / <i>direct taxes</i>	<u>2 136 612</u>	<u>1 956 546</u>	<u>2 528 301</u>	<u>1 674 418</u>	<u>3 019 739</u>	<u>3 019 739</u>
a. Pajak perseroan minyak / <i>Oil company taxes</i>	-	-	-	-	-	-
b. Pajak bukan perseroan minyak / <i>Non-oil company taxes</i>	1 621 040	1 466 615	1 716 492	1 490 457	2 692 168	2 692 168
c. Pajak pendapatan / <i>Income taxes</i>	-	-	-	-	-	-
d. Pajak langsung lainnya / <i>Other direct taxes</i>	515 572	489 931	811 809	183 961	327 571	327 571
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda / <i>Compulsory fees fines & penalties</i>	2 725 800	2 987 071	3 850 296	3 184 238	4 743 210	4 743 210
6. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Un-funded employee contribution</i>	-	-	-	-	-	-
7. Transfer dari / <i>Current transfer from :</i>	<u>26 179 447</u>	<u>29 646 438</u>	<u>37 013 150</u>	<u>70 896 221</u>	<u>76 835 067</u>	<u>76 835 067</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	786 627	892 659	2 765 679	15 056 665	16 362 369	16 362 369
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	25 392 820	28 753 779	34 247 471	55 839 556	60 472 698	60 472 698
JUMLAH PENERIMAAN TOTAL RECEIPTS	39 958 591	42 394 629	53 433 660	82 878 485	90 795 893	90 795 893

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 2.e NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN DESA
Table : 2.e INCOME AND OUTLAY ACCOUNTS OF VILLAGE GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Pengeluaran</u> <i>Expenditure</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran konsumsi / <i>Final consumption expenditure</i>	2 006 272	2 574 444	2 632 161	3 207 541	4 248 825	4 736 450
2. <i>Property income</i> yang dibayarkan/ <i>Property income paid</i>	-	-	-	-	-	-
a. Bunga / <i>Interest</i>	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	-	-	-	-	-	-
c. Sewa tanah / <i>Land rent & royalties</i>	-	-	-	-	-	-
3. Subsidi / <i>Subsidies</i>	-	-	-	-	-	-
4. Bantuan sosial / <i>Social assistance grants</i>	106 210	116 538	243 443	141 841	205 433	297 532
5. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Unfunded employee welfare</i>	-	-	-	-	-	-
6. Transfer kepada / <i>Current transfer to :</i>	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
7. Tabungan / <i>Savings</i>	1 468 566	94 065	20 740	1 218 911	925 635	1 962 745
<u>JUMLAH PENGELUARAN</u> <u>TOTAL DISBURSEMENTS</u>	3 581 048	2 785 047	2 896 344	4 568 293	5 379 893	6 996 727

^{*)} Angka sementara / *preliminary figure*

Lanjutan / *Continued*Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

Penerimaan <i>Receipts</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Laba bersih / <i>Operating surplus</i>	-	-	-	-	-	-
2. <i>Property income</i> yang diterima / <i>Property income receipts</i>	<u>171 419</u>	<u>146 550</u>	<u>281 083</u>	<u>223 176</u>	<u>199 194</u>	<u>199 194</u>
a. Bunga / <i>Interest</i>	-	-	-	-	-	-
b. Laba saham / <i>Dividends</i>	10 850	15 702	19 847	41 337	77 613	77 613
c. Sewa tanah / <i>Landrent & royalties</i>	160 569	130 848	261 236	181 839	121 581	121 581
3. Pajak tak langsung / <i>Indirect taxes</i>	<u>413 314</u>	<u>344 538</u>	<u>403 238</u>	<u>397 455</u>	<u>717 912</u>	<u>717 912</u>
a. Pajak import / <i>Import duty</i>	-	-	-	-	-	-
b. Pajak hasil produksi D.N. / <i>Taxes on domestic goods and services</i>	413 314	344 538	403 238	397 455	717 912	717 912
c. Pajak tak langsung lainnya / <i>Other indirect taxes</i>	-	-	-	-	-	-
4. Pajak langsung / <i>direct taxes</i>	-	-	-	-	-	-
a. Pajak perseroan minyak / <i>Oil company taxes</i>	-	-	-	-	-	-
b. Pajak bukan perseroan minyak / <i>Non-oil company taxes</i>	-	-	-	-	-	-
c. Pajak pendapatan / <i>Income taxes</i>	-	-	-	-	-	-
d. Pajak langsung lainnya / <i>Other direct taxes</i>	-	-	-	-	-	-
5. Pungutan-pungutan dan denda-denda / <i>Compulsory fees fines & penalties</i>	302 867	331 897	427 810	353 804	527 023	527 023
6. Imputasi kesejahteraan pegawai / <i>Un-funded employee contribution</i>	-	-	-	-	-	-
7. Transfer dari / <i>Current transfer from :</i>	<u>2 693 448</u>	<u>1 962 062</u>	<u>1 784 213</u>	<u>3 593 858</u>	<u>3 935 764</u>	<u>3 935 764</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	2 436 955	1 671 620	906 073	2 162 075	2 385 182	2 385 182
b. Sektor lainnya / <i>Other resident sector</i>	256 493	290 442	878 140	1 431 783	1 550 582	1 550 582
JUMLAH PENERIMAAN TOTAL RECEIPTS	3 581 048	2 785 047	2 896 344	4 568 293	5 379 893	5 379 893

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 3.a NERACA MODAL PEMERINTAHAN UMUM
Table : 3.a **CAPITAL ACCOUNTS OF GENERAL GOVERNMENT**

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal <i>Capital Formation</i>						
1. Perubahan stok / <i>Increase in stock</i>	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto / <i>Gross fixed capital formation</i>						
3. Pembelian tanah / <i>Purchases of land</i>						
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud / <i>Purchases of intangible assets</i>	53 594 066	61 995 603	82 561 642	76 436 719	90 212 879	113 721 055
5. Tranfer modal ke / <i>Capital transfer to:</i>	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya / <i>Other Resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Modal <i>Finance of gross accumulation</i>						
6. Tabungan / <i>Savings</i>	45 126 404	69 918 896	93 802 843	89 839 124	92 825 795	160 401 393
7. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	6 614 386	7 110 833	11 189 274	12 017 327	15 987 159	20 680 469
8. Tranfer modal dari / <i>Capital transfer from :</i>	<u>51 629</u>	<u>296 122</u>	<u>427 875</u>	<u>277 963</u>	<u>1 296 064</u>	<u>1 857 212</u>
1. Dalam Negeri / <i>Domestic</i>	-	-	-	-	14 857	698
a. PBB / Ipeda	-	-	-	-	-	-
b. Dati II	-	-	-	-	-	-
c. Dati I	-	-	-	-	-	-
d. Pusat	-	23 325	-	-	14 857	698
2. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	51 629	272 797	427 875	277 963	1 281 207	1 856 514
9. Pinjaman neto / <i>Net Borrowing</i>	1 801 647	- 15 330 248	- 22 858 350	- 25 697 695	- 19 896 139	- 69 218 019
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/ PEMBIYAAAN MODAL <i>GROSS CAPITAL FORMATION/ TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION</i>	53 594 066	61 995 603	82 561 642	76 436 719	90 212 879	113 721 055

*) Angka sementara / ***preliminary figure***

Tabel : 3.b NERACA MODAL PEMERINTAHAN PUSAT
Table : CAPITAL ACCOUNTS OF CENTRAL GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal <i>Capital Formation</i>						
1. Perubahan stok / <i>Increase in stock</i>	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto / <i>Gross fixed capital formation</i>						
3. Pembelian tanah / <i>Purchases of land</i>						
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud / <i>Purchases of intangible assets</i>	25 092 469	27 323 344	47 212 833	48 544 549	36 853 496	58 931 084
5. Tranfer modal ke / <i>Capital transfer to:</i>	<u>50 530 590</u>	<u>61 682 328</u>	<u>76 220 020</u>	<u>55 303 881</u>	<u>69 966 498</u>	<u>97 384 944</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	50 530 590	61 682 328	76 220 020	55 303 881	69 966 498	97 384 944
b. Sektor lainnya / <i>Other Resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Modal <i>Finance of gross accumulation</i>						
6. Tabungan / <i>Savings</i>	34 459 423	66 366 002	89 845 661	72 586 513	87 115 369	109 877 979
7. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	5 018 494	5 464 669	9 442 567	9 708 910	7 370 699	11 786 217
8. Tranfer modal dari / <i>Capital transfer from:</i>	<u>51 629</u>	<u>296 122</u>	<u>427 874</u>	<u>277 963</u>	<u>1 296 064</u>	<u>1 857 211</u>
1. Dalam Negeri / <i>Domestic</i>	-	-	-	-	14 857	697
a. PBB / Ipeda	-	-	-	-	-	-
b. Dati II	-	-	-	-	-	-
c. Dati I	-	-	-	-	-	-
d. Pusat	-	23 325	-	-	14 857	697
2. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	51 629	272 797	427 874	277 963	1 281 207	1 856 514
9. Pinjaman neto / <i>Net Borrowing</i>	36 093 513	16 878 879	23 716 751	21 275 044	11 037 862	32 794 620
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/ PEMBIYAAAN MODAL <i>GROSS CAPITAL FORMATION/ TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION</i>	75 623 059	89 005 672	123 432 853	103 848 430	106 819 994	156 316 028

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 3.c NERACA MODAL PEMERINTAHAN PROPINSI
Table : 3.c **CAPITAL ACCOUNTS OF PROVINCIAL GOVERNMENT**

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal Capital Formation						
1. Perubahan stok / <i>Increase in stock</i>	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto / Gross fixed capital formation						
3. Pembelian tanah / Purchases of land						
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud / Purchases of intangible assets	7 944 604	11 311 476	10 135 852	10 848 389	17 258 637	17 815 050
5. Tranfer modal ke / Capital transfer to:	<u>255 848</u>	<u>468 823</u>	<u>1 124 708</u>	<u>1 001 182</u>	<u>1 079 695</u>	<u>1 175 558</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	255 848	468 823	1 124 708	1 001 182	1 079 695	1 175 558
b. Sektor lainnya / Other Resident sector	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / The Rest of the World	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Modal Finance of gross accumulation						
6. Tabungan / Savings	1 900 581	148 722	405 898	1 378 449	2 321 458	17 497 670
7. Penyusutan barang modal / Consumption of fixed capital	472 026	479 883	498 535	547 761	3 451 727	3 563 010
8. Tranfer modal dari / Capital transfer from:	<u>12 403 471</u>	<u>15 420 582</u>	<u>19 055 004</u>	<u>13 825 970</u>	<u>20 989 949</u>	<u>29 215 483</u>
1. Dalam Negeri / Domestic	12 403 471	15 420 582	19 055 004	13 825 970	20 989 949	29 215 483
a. PBB / Ipeda	4 289 704	4 257 057	4 977 297	8 744 628	19 851 465	45 065 459
b. Dati II	-	-	-	-	-	-
c. Dati I	-	-	-	-	-	-
d. Pusat	8 113 767	11 163 525	14 077 707	5 081 342	1 138 484	- 15 849 976
2. Luar Negeri / The Rest of the World	-	-	-	-	-	-
9. Pinjaman neto / Net Borrowing	- 6 575 626	- 4 268 888	- 8 698 877	- 3 902 609	- 8 424 802	- 31 285 555
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/ PEMBIYAAAN MODAL GROSS CAPITAL FORMATION/ TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION	8 200 452	11 780 299	11 260 560	11 849 571	18 338 332	18 990 608

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 3.d NERACA MODAL PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
Table : **CAPITAL ACCOUNTS OF REGENCIAL GOVERNMENT**

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal <i>Capital Formation</i>						
1. Perubahan stok / <i>Increase in stock</i>	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto / <i>Gross fixed capital formation</i>						
3. Pembelian tanah / <i>Purchases of land</i>						
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud / <i>Purchases of intangible assets</i>	18 501 294	21 024 705	22 691 661	16 232 173	34 809 563	35 642 110
5. Tranfer modal ke / <i>Capital transfer to:</i>	<u>210 548</u>	<u>184 547</u>	<u>220 111</u>	<u>720 692</u>	<u>795 061</u>	<u>865 652</u>
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	210 548	184 547	220 111	720 692	795 061	865 652
b. Sektor lainnya / <i>Other Resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Modal <i>Finance of gross accumulation</i>						
6. Tabungan / <i>Savings</i>	7 297 832	3 310 107	3 530 544	14 655 251	2 463 333	31 063 000
7. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	1 047 158	1 080 438	1 162 152	1 672 623	4 906 496	5 064 680
8. Tranfer modal dari / <i>Capital transfer from:</i>	<u>37 802 253</u>	<u>45 849 561</u>	<u>56 665 147</u>	<u>41 251 632</u>	<u>48 667 318</u>	<u>69 618 157</u>
1. Dalam Negeri / <i>Domestic</i>	37 802 253	45 849 561	56 665 147	41 251 632	48 667 318	69 618 157
a. PBB / Ipeda	5 640 603	5 043 280	7 178 204	18 849 974	42 791 941	97 143 383
b. Dati II	-	-	-	-	-	-
c. Dati I	-	-	-	-	-	-
d. Pusat	32 161 650	40 806 281	49 486 943	22 401 658	5 875 377	- 27 525 227
2. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
9. Pinjaman neto / <i>Net Borrowing</i>	- 27 435 401	- 29 030 854	- 38 446 071	- 40 626 641	- 20 432 523	- 69 238 075
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/ PEMBIYAAAN MODAL <i>GROSS CAPITAL FORMATION/ TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION</i>	18 711 842	21 209 252	22 911 772	16 952 865	35 604 624	36 507 762

*) Angka sementara / *preliminary figure*

Tabel : 3.e NERACA MODAL PEMERINTAHAN DESA
Table : 3.e CAPITAL ACCOUNTS OF VILLAGE GOVERNMENT

TAHUN / YEAR : 2001-2006

Jutaan Rupiah / *Millions of Rupiahs*

<u>Uraian</u> <i>Description</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembentukan Modal <i>Capital Formation</i>						
1. Perubahan stok / <i>Increase in stock</i>	-	-	-	-	-	-
2. Pembentukan modal tetap bruto / <i>Gross fixed capital formation</i>						
3. Pembelian tanah / <i>Purchases of land</i>	2 055 699	2 336 078	2 521 296	811 609	1 291 183	1 332 110
4. Pembelian barang modal yang tidak berwujud / <i>Purchases of intangible assets</i>						
5. Tranfer modal ke / <i>Capital transfer to:</i>	-	-	-	-	-	-
a. Sektor Pemerintah / <i>Government sector</i>	-	-	-	-	-	-
b. Sektor lainnya / <i>Other Resident sector</i>	-	-	-	-	-	-
c. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Modal <i>Finance of gross accumulation</i>						
6. Tabungan / <i>Savings</i>	1 468 566	94 065	20 740	1 218 911	925 635	1 962 744
7. Penyusutan barang modal / <i>Consumption of fixed capital</i>	76 708	85 843	86 021	88 033	258 237	266 562
8. Tranfer modal dari / <i>Capital transfer from :</i>	<u>1 004 236</u>	<u>1 695 439</u>	<u>1 844 689</u>	<u>1 948 153</u>	<u>2 183 985</u>	<u>592 514</u>
1. Dalam Negeri / <i>Domestic</i>	1 004 236	1 695 439	1 844 689	1 948 153	2 183 985	592 514
a. PBB / Ipeda	-	-	-	-	-	-
b. Dati II	210 548	184 547	220 113	720 692	795 061	865 652
c. Dati I	468 823	1 098 707	1 124 708	1 001 182	1 079 694	1 175 558
d. Pusat	324 865	412 185	499 868	226 279	309 230	- 1 448 696
2. Luar Negeri / <i>The Rest of the World</i>	-	-	-	-	-	-
9. Pinjaman neto / <i>Net Borrowing</i>	- 493 811	460 731	569 846	- 2 443 488	- 2 076 674	- 1 489 010
JUMLAH PEMBENTUKAN MODAL/ PEMBIYAAAN MODAL <i>GROSS CAPITAL FORMATION/ TOTAL FINANCE OF GROSS ACCUMULATION</i>	2 055 699	2 336 078	2 521 296	811 609	1 291 183	1 332 110

*) Angka sementara / *preliminary figure*